

**PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
SUKU BADUY DALAM DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**

(Tesis)

Oleh

**HERMAN
NPM 2220021003**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PENYULUHAN
PEMBANGUNAN/ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
SUKU BADUY DALAM DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**

Oleh

HERMAN

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS**

Pada

**Program Pascasarjana
Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/
Pemberdayaan Masyarakat**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PENYULUHAN
PEMBANGUNAN/ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRACT

COMMUNITY SOCIO-ECONOMIC EMPOWERMENT INNER BADUY TRIBE IN LEBAK DISTRICT, BANTEN PROVINCE

BY

HERMAN

The aim of this research is to analyze the interaction between natural ecosystems and social systems, analyze the factors of rejection and acceptance of empowerment programs, and analyze the socio-economic empowerment model in the Baduy Dalam community which is in line with Pikukuh Karuhun. This research method uses descriptive qualitative research with a phenomenological and ethnographic approach. The results of this research are: 1) The interaction between the natural ecosystem and the social system of Baduy Dalam is something that cannot be separated. Therefore, every element of the ecosystem such as water, soil, fish, livestock, plants, weeds and wood are supporting elements in supporting the lives of the Baduy Dalam community. 2) Factors rejecting community empowerment in the Baduy Dalam ethnic group are categorized into five factors, namely: belief in Sundanese wiwitan (religious), sovereignty and cultural identity, incompatibility of programs with needs, non-inclusive methods and approaches, and lack of government role. Factors rejecting community empowerment in the Baduy Dalam ethnic group are categorized into four factors, namely: participatory approach, direct benefits to the community, assistance and sustainability, and the role of government in making policies. 3) The socio-economic empowerment model that can be applied to the Baduy Dalam community is an empowerment model that is in line with Pikukuh Karuhun and utilizes raw materials available in Baduy Dalam, so that it does not conflict with the beliefs of the Baduy Dalam community.

Key Words: *Community interaction, Inner Baduy, empowerment model*

ABSTRAK

PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SUKU BADUY DALAM DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

BY

HERMAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis interaksi antara ekosistem alam dengan sistem sosial, menganalisis faktor-faktor penolakan dan penerimaan program pemberdayaan, dan menganalisis model pemberdayaan sosial ekonomi pada masyarakat Baduy Dalam yang selaras dengan *Pikukuh Karuhun*. Metode penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan etnografi. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Interaksi antara ekosistem alam dengan sistem sosial Baduy Dalam merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan. Oleh karena itu setiap unsur ekosistem seperti air, tanah, ikan, ternak, tanaman, gulma, dan kayu merupakan unsur-unsur penunjang dalam menyokong kehidupan masyarakat Baduy Dalam. 2) Faktor-faktor penolakan pemberdayaan masyarakat pada kelompok suku Baduy Dalam dikategorikan ke dalam lima faktor yaitu: kepercayaan terhadap sunda wiwitan (religious), kedaulatan dan identitas budaya, ketidaksesuaian program dengan kebutuhan, metode dan pendekatan yang tidak inklusif, dan kurangnya peran pemerintah. Faktor-faktor penolakan pemberdayaan masyarakat pada kelompok suku Baduy Dalam dikategorikan ke dalam empat faktor yaitu: pendekatan partisipatif, manfaat langsung pada masyarakat, pendampingan dan berkelanjutan, dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan. 3) Model pemberdayaan sosial ekonomi yang memungkinkan diterapkan pada Masyarakat Baduy Dalam yaitu model pemberdayaan yang selaras dengan *Pikukuh Karuhun* dan memanfaatkan bahan baku yang ada di Baduy Dalam, sehingga tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat Baduy Dalam.

Kata Kunci: Interaksi masyarakat, Baduy Dalam, model pemberdayaan

Judul Tesis : **PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT SUKU BADUY DALAM DI
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**

Nama Mahasiswa : **Herman**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2220021003

Program Studi : **Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/
Pemberdayaan Masyarakat**

Fakultas : **Pascasarjana Multidisiplin**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

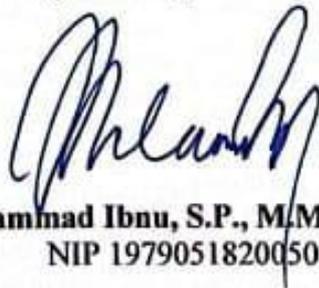


Dr. Ir. Sumaryo Gitosaputro, M.Si.
NIP 196403271990031004



Dr. Yuniar Aviaty Syarief, S.P., M.T.A.
NIP 196906112003122001

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/
Pemberdayaan Masyarakat Universitas Lampung**



Muhammad Ibnu, S.P., M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 197905182005011002

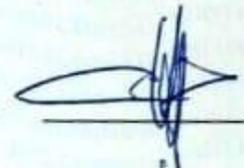
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ir. Sumaryo Gitosaputro, M.Si.



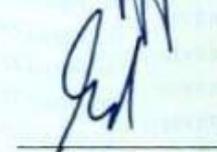
Sekretaris : Dr. Yuniar Aviati Syarief, S.P., M.T.A.



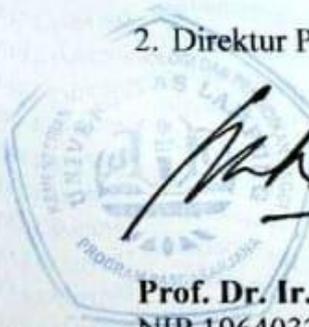
**Penguji
Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Kordiyana K. Rangga, M.S.**



Anggota : Dr. Maya Riantini, S.P., M.Si.



2. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 26 September 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahawa:

1. Tesis dengan judul: **“PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SUKU BADUY DALAM DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Oktober 2024
Yang membuat pernyataan,



HERMAN
NPM 2220021003

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lebak, 02 September 1999. Penulis adalah anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Anung dan Ibu Yati. Penulis menyelesaikan studi pendidikan dasar di SDN 2 Jalupang Mulya Tahun 2012 dan pendidikan menengah pertama di SMPN 5 Leuwidamar diselesaikan pada Tahun 2015. Pendidikan menengah atas di SMAN 1 Leuwidamar diselesaikan pada Tahun 2018. Penulis diterima pada Jurusan Agribisnis, Program Studi Penyuluhan Pertanian Universitas Lampung pada Tahun 2018 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan diselesaikan pada Tahun 2022.

Pada tahun yang sama yaitu Tahun 2022 penulis diterima di Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Lampung melalui Jalur Beasiswa Bebas SPP/Uang Kuliah Pascasarjana. Pada perjalanan menempuh Pendidikan S-2, Penulis turut serta dalam membantu dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian di Kabupaten Pesawaran mengenai Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes).

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrabbi'alamiin, puji syukur senantiasa Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Suku Baduy Dalam di Kabupaten Lebak Provinsi Banten**”.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak.

Kesempatan kali ini dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang penuh kesabaran dan dedikasi membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1) Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
- 2) Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S., selaku mantan Ketua Program Studi
- 3) Muhammad Ibnu, S.P., M.M., M.Sc., Ph.d., selaku Ketua Program Studi
- 4) Dr. Ir. Sumaryo Gitosaputro, M.Si., dan Dr. Yuniar Aviati Syarief, S. P., M.T.A., selaku Dosen Pembimbing pertama dan kedua yang telah memberikan doa, ilmu, materi, bimbingan, nasihat, arahan, dukungan, saran, motivasi, serta semua kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis selama menjalankan perkuliahan terutama dalam penyelesaian tesis.
- 5) Prof. Dr. Ir. Kordiyana K Rangga, M.S., dan Dr. Maya Riantini, M.Si selaku Ketua dan anggota Dosen Pembahas yang juga memberikan doa, bimbingan, ilmu, dukungan, motivasi, arahan, kesabaran, nasihat, saran, dan semua kebaikan yang telah diberi kepada Penulis dalam penyelesaian tesis.

- 6) Kedua orang tua tercinta, Bapak Anung dan Emak Yati, yang selalu memberikan doa, semangat, ilmu, menjadi tempat bercurah dan bercerita ketika merasa terpuruk, memberikan apapun yang diminta dengan berbagai cara untuk mengabulkannya dan pastinya memberi motivasi kepada Penulis.
- 7) Para Informan Masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar, terima kasih telah membantu Penulis untuk mendapatkan informasi dalam penyelesaian tesis.
- 8) Keluarga besar saya di rumah Teh Uum, Teh Aay, Ka Udin, Ka Deni, Ka Endum dan ponakan-ponakan saya yang telah memotivasi dan mendoakan Penulis dalam menyelesaikan tesis.
- 9) Sahabat-sahabat Penulis Daus, Ari, Ali, Fatih, Rama, Lucky, Tanjung, Niza, Dania dll yang sudah mengajarkan, mendoakan dan memberikan semangat bagi Penulis menyelesaikan tesis.
- 10) Sahabat-sahabat dan keluarga besar dari Forkom Alumni BPH Al-Wasi'i Unila, IKA FOSI FP Unila, IKA Birohmah Unila dan Bappeda Provinsi Lampung yang selalu memotivasi dan memberikan ruang belajar bagi Penulis menyelesaikan tesis dan mencari ilmu lainnya.
- 11) Drama Korea (DRAKOR) *Queen of Tears* sebagai film favorit yang menemani perjuangan penyusunan Tesis ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas dan memberikan rahmat serta kebaikannya yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam Penulis tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, namun semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, September 2024
Penulis

Herman

PERSEMBAHAN

Emak dan Bapak Tersayang

MOTTO

“Hidup adalah tentang pembelajaran tanpa henti, karena setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik.”

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
KOSAKATA ASING	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat	9
2.2 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal	14
2.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	15
2.4 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	16
2.5 Faktor Penerimaan dan Penghambat Program Pemberdayaan	18
2.6 Model Pemberdayaan Masyarakat	20
2.7 Inovasi Teknologi Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal	25
2.8 Dampak Pemberdayaan Masyarakat	27
2.9 Ekologi Manusia Terry Rambo	28
2.10 Masyarakat Suku Baduy.....	30
2.11 Masyarakat Baduy Dalam dan Masyarakat Baduy Luar	33
2.12 <i>Pikukuh</i> Baduy.....	35
2.13 Penelitian Terdahulu.....	40
2.14 Kerangka Pemikiran	45

III. METODE PENELITIAN	47
3.1 Definisi Operasional	47
3.2 Tipe Penelitian	48
3.3 Lokasi Penelitian	48
3.4 Penentuan Informan	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data	50
3.6 Teknik Pengolahan Data	52
3.7 Teknik Pengecekan Keabsahan Data	54
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Kondisi Geografis Wilayah Desa Kanekes	57
4.2 Struktur Sosial, Ekonomi dan Kebudayaan Baduy	59
4.3 Jumlah Penduduk Suku Baduy	61
4.4 Sistem Pemerintahan Suku Baduy	64
4.5 Ekosistem Baduy	70
4.5.1 Air	70
4.5.2 Tanah	72
4.5.3 Ikan	76
4.5.4 Ternak	78
4.5.5 Gulma	80
4.5.6 Tanaman	82
4.5.7 Kayu (pohon)	89
4.6 Sistem Sosial Baduy Dalam	92
4.6.1 Teknologi	92
4.6.2 Organisasi Sosial	94
4.6.3 Ekonomi	96
4.6.4 Pendidikan	98
4.6.5 Ideologi	102
4.6.6 Budaya	105
4.6.7 Kesehatan	109
4.7 Interaksi Ekosistem dan Sistem Sosial pada Masyarakat Baduy Dalam	111
4.7.1 Interaksi ekosistem alam dengan teknologi di Baduy Dalam ...	114
4.7.2 Interaksi ekosistem alam dengan organisasi sosial pada masyarakat Baduy Dalam	115
4.7.3 Interaksi ekosistem alam dengan ekonomi pada masyarakat Baduy Dalam	118

4.7.4	Interaksi ekosistem alam dengan pendidikan pada masyarakat Baduy Dalam.....	121
4.7.5	Interaksi ekosistem alam dengan ideologi pada masyarakat Baduy Dalam.....	124
4.7.6	Interaksi ekosistem alam dengan budaya pada masyarakat Baduy Dalam.....	126
4.7.7	Interaksi ekosistem alam dengan kesehatan pada masyarakat Baduy Dalam.....	129
4.8	Faktor-Faktor Penolakan dan Penerimaan Pemberdayaan pada Masyarakat Baduy Dalam	131
4.8.1	Faktor-Faktor Penolakan Pemberdayaan di Masyarakat Baduy Dalam.....	131
4.8.2	Faktor-Faktor Penerimaan Pemberdayaan di Masyarakat Baduy Dalam.....	135
4.9	Model Pemberdayaan Ekonomi yang Memungkinkan diterapkan pada Masyarakat Baduy Dalam	138
V.	SIMPULAN DAN SARAN.....	159
5.1	Simpulan.....	159
5.2	Saran	160
	DAFTAR PUSTAKA	162

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian terdahulu	40
2. Jumlah kampung dan penduduk di Desa Kanekes (Baduy)	60
3. Daftar nama <i>Puun</i> di wilayah Baduy Dalam	64
4. Interaksi ekosistem alam dengan teknologi di Baduy Dalam	113
5. Interaksi ekosistem alam dengan organisasi sosial pada masyarakat Baduy Dalam	115
6. Interaksi ekosistem alam dengan ekonomi pada masyarakat Baduy Dalam.	117
7. Interaksi ekosistem alam dengan pendidikan pada masyarakat Baduy Dalam	119
8. Interaksi ekosistem alam dengan ideologi pada masyarakat Baduy Dalam	122
9. Interaksi ekosistem alam dengan budaya pada masyarakat Baduy Dalam	125
10. Interaksi ekosistem alam dengan kesehatana pada masyarakat Baduy Dalam	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Hubungan timbal balik sistem sosialnya dengan ekosistem	29
2. Peneliti bersama Orang Tangtu (Orang Baduy Dalam)	34
3. Peneliti bersama Orang Panamping (orang Baduy Luar)	35
4. Kerangka pemikiran model pemberdayaan ekonomi pada masyarakat Suku Baduy Dalam yang selaras dengan <i>Pikukuh Karuhun</i>	45
5. Peta Desa Kanekes	48
6. Patung selamat datang di Ciboleger	57
7. Struktur Organisasi Pemerintahan Baduy	63
8. Tanaman orok-orok (<i>Crotalaria juncea L</i>)	74
9. Proses penangkapan ikan oleh masyarakat Baduy di sungai	76
10. Pemeliharaan ayam kampung di Baduy.....	78
11. Kandang tempat mengeram induk ayam kampung.....	79
12. Tahapan ritual membuka lahan untuk bercocok tanam	81
13. Tumbuhan untuk racikan membuat <i>Samara Pungpuhunan</i>	86
14. Racikan <i>Samara Pungpuhunan</i> untuk padi berumur 60 HST	87
15. Proses <i>ngaseuk</i> masyarakat Baduy	89
16. Kerajinan tangan tas <i>koja</i> Baduy	90
17. Peralatan pertanian Baduy	92
18. Suku Baduy Dalam berjalan kaki	106
19. Amanat Buyut untuk masyarakat Baduy	111
20. Model Pemberdayaan KB pada masyarakat Baduy Dalam	137
21. Model pemberdayaan sosial ekonomi pada masyarakat Baduy Dalam	139
22. Tanaman koro benguk (<i>Mucuna pruriens L</i>).....	149
23. Sarang madu dari batang pohon kelapa (<i>glodok</i>)	153

KOSAKATA ASING

No	Bahasa Sunda/Baduy	Bahasa Indonesia
1	<i>Taneuh Titipan</i>	= Tanah Titipan
2	<i>Buyut</i>	= Leluhur
3	<i>Pikukuh Karuhun</i>	= Aturan Adat dari Leluhur
4	<i>Sunda Wiwitan</i>	= Sistem Kepercayaan Masyarakat Baduy
5	<i>Puun</i>	= Pemimpin Adat Masyarakat Baduy
6	<i>Nu Ngersakeun</i>	= Yang Menghendaki
7	<i>Batara Tunggal</i>	= Yang Maha Esa
8	<i>Sasaka Domas</i>	= Tempat Keramat Orang Baduy
9	<i>Nyulah</i>	= Utara
10	<i>Nyanda</i>	= Selatan
11	<i>Leuit</i>	= Tempat Menyimpan Padi
12	<i>Huma</i>	= Adang Pertanian Baduy
13	<i>Kawalu</i>	= Upacara Adat Baduy Setelah Panen
14	<i>Kasa</i>	= Satu
15	<i>Karo</i>	= Dua
16	<i>Katiga</i>	= Tiga
17	<i>Ngalaksa</i>	= Upacara Adat untuk Keselamatan Baduy
18	<i>Seba</i>	= Upacara Adat untuk Menghadap Bupati dan Gubernur
19	<i>Jaro</i>	= Kepala Desa
20	<i>Kokolot</i>	= Sesepuh
21	<i>Lembur</i>	= Kampung
22	<i>Ngaranjah</i>	= Merusak
23	<i>Nyacar</i>	= Membersihkan Lahan
24	<i>Ngahuru</i>	= Membakar
25	<i>Samara Pungpuhunan</i>	= Bumbu untuk Menanam/ Bumbu tanaman
26	<i>Ngaseuk</i>	= Menugal Tanah
27	<i>Ngubaran</i>	= Mengobati
28	<i>Panyakit</i>	= Penyakit
29	<i>Paraji</i>	= Dukun
30	<i>Pare</i>	= Padi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan banyaknya suku bangsa, serta memiliki corak kebudayaan yang berbeda-beda sesuai dengan identitas dari masing-masing golongan. Keragaman tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti adat istiadat, cara pandang, nilai-nilai budaya yang terkandung, etika, sistem keyakinan dan masih banyak lagi perbedaan yang menjadi identitas setiap kelompok masyarakat. Sejalan dengan definisi suku bangsa Bahrudin dkk (2021) bahwa suku bangsa adalah suatu golongan masyarakat yang memiliki keyakinan atau kesadaran akan kesamaan identitas mengenai kesatuan sistem sosial budaya.

Kesadaran akan identitas dan kesatuan sistem kebudayaan menciptakan kesamaan dalam adat-istiadat, agama, bahasa, bahkan keturunan. Fakta sosial ini menjadi dasar pandangan masyarakat mengenai perbedaan identitas budaya antar suku bangsa. Suku Baduy, sebagai salah satu suku di Provinsi Banten, memiliki identitas yang mencolok dengan keunikan budaya dan tradisinya yang khas. Suku Baduy merupakan salah satu suku di Indonesia yang menjaga agar budaya mereka tidak terpengaruh oleh budaya luar. Hal ini sebagai bentuk menjaga tradisi secara turun temurun yang telah diwariskan oleh leluhur, sehingga kehidupan masyarakat Suku Baduy masih terikat aturan adat yang serba tradisional serta jauh dari kata modern. Aturan adat ini terlihat seperti membatasi masyarakat Baduy untuk berkembang dalam meningkatkan taraf hidup mereka, namun disisi lain

hukum adat yang terlihat membatasi tersebut merupakan kebenaran bagi keberlangsungan hidup mereka.

Keunikan yang dimiliki oleh masyarakat Suku Baduy yaitu terlihat dari corak budayanya, seperti gaya hidup, sistem religi, sistem pengetahuan, serta kepedulian mereka untuk menjaga lingkungan. Masyarakat Suku Baduy mempercayai bahwa keberadaan mereka yaitu untuk menjaga kelestarian alam, mereka meyakini bahwa penciptaan mereka adalah sebagai pengelola tanah suci (*taneuh titipan*) yang menjadi pusat bumi.

Berdasarkan kepercayaan tersebut, masyarakat Suku Baduy memiliki tugas dalam menjaga tanah Baduy agar tidak rusak, sebagaimana konsep hidup mereka yaitu “gunung tidak boleh dilebur, hutan tidak boleh dirusak, aliran air tidak boleh diganggu dan lembah tidak boleh dirusak”. Pandangan ini sejalan dengan aktivitas masyarakat Suku Baduy dalam menjaga kelestarian alam. Hasil observasi menunjukkan bahwa mereka menjaga kebersihan sungai dari pencemaran, melestarikan hutan, serta tidak menggunakan sabun dan peralatan mandi seperti yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Selain itu, masih banyak keunikan budaya lain yang menjadi ciri khas Suku Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Selain memiliki budaya yang unik, Suku Baduy juga menunjukkan sikap yang dapat dianggap memiliki dampak negatif, karena mereka menutup diri dari pengaruh luar, termasuk unsur-unsur budaya modern seperti penggunaan teknologi komunikasi, *handphone*, televisi, dan listrik. Larangan tersebut merupakan bagian dari aturan-aturan adat yang masyarakat Baduy yakini. Aturan-aturan tersebut merupakan titipan *Buyut* masyarakat Baduy, hukum adat tersebut disebut sebagai *pikukuh*. *Pikukuh* berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat Baduy agar tetap berada di jalan yang benar. Selain menjadi pedoman hidup, *pikukuh* juga berperan sebagai kontrol sosial bagi masyarakat adat. Hukum adat ini bertujuan untuk menjaga kelestarian budaya, bukan untuk kepentingan pribadi ketua adat maupun masyarakat Baduy (Sujana, 2020; Nadroh, 2018).

Masyarakat Baduy Dalam sangat teguh memegang *pikukuh* adat, berbeda dengan masyarakat Baduy Luar yang mulai terbuka terhadap budaya luar. Aturan adat bagi Baduy Luar juga lebih longgar dibandingkan dengan masyarakat Baduy Dalam (Kurnia dan Sihabudin, 2010). Salah satu aturan dalam *pikukuh* yaitu melarang anak-anak masyarakat Baduy untuk bersekolah, sehingga kehidupan mereka tetap benar-benar tradisional. Keunikan Suku Baduy ini menjadi bagian penting dari kearifan lokal dalam mempertahankan adat dan budaya setempat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Aulia dan Dharmawan (2010), kearifan lokal mencakup nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat setempat, berupa tradisi, budaya, atau moto hidup, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan mereka.

Saat ini, Suku Baduy menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan sosial, modernisasi, serta akses terbatas terhadap sumber daya dan infrastruktur. Globalisasi semakin menggerus budaya lokal suku bangsa, dan hilangnya tradisi serta identitas mereka semakin cepat dipercepat oleh perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Fakta ini merupakan dampak nyata dari perkembangan zaman. Oleh karena itu pemangku adat masyarakat Baduy sudah mewaspadaikan hal tersebut, sehingga hasil observasi menunjukkan bahwa pemangku adat menyampaikan permintaannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak agar memutus akses jaringan ke daerah Suku Baduy. Keputusan ini menjadi dilema bagi pemerintah, karena dihadapkan pada program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya pendekatan kepada masyarakat Baduy melalui pemberdayaan yang relevan untuk memastikan keberlanjutan budaya dan kesejahteraan masyarakat Baduy.

Memberdayakan masyarakat merupakan upaya dalam meningkatkan harkat serta martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memungkinkan untuk memandirikan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Hutapea, 2022). Melalui pemberdayaan masyarakat yang optimal maka

pembangunan ekonomi suatu daerah juga akan meningkat. Pemberdayaan merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui pemanfaatan potensi diantaranya berbasis pada sumber daya lokal dan kearifan lokal yang mereka miliki. Tujuan pemberdayaan masyarakat bukanlah untuk menciptakan ketergantungan terhadap berbagai program bantuan dari luar, melainkan untuk memungkinkan masyarakat menikmati hasil usaha mereka sendiri yang dapat dipertukarkan dengan pihak lain. Dengan demikian, masyarakat akan mampu berdaya secara ekonomi.

Masyarakat Baduy, terutama Baduy Dalam, mengandalkan kehidupan mereka pada pertanian tradisional melalui sistem perladangan berpindah. Pertanian mereka mengelola lahan kering dan lahan miring, dengan rata-rata hasil padi ladang sebesar 2,3 ton per hektar (Dachlan, 2019). Luas tanah ulayat Baduy mencapai 5.100 hektar, namun hanya 274 hektar yang dimanfaatkan sebagai daerah pertanian, sisanya adalah hutan adat. Jika luas areal pertanian tersebut dikurangi dengan lahan perkampungan, maka lahan pertanian masyarakat Baduy menjadi semakin sempit. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, ketersediaan lahan pertanian tersebut tidak lagi cukup untuk menopang kehidupan masyarakat Baduy di masa depan.

Selama 20 tahun terakhir, masyarakat Baduy telah melakukan penganekaragaman jenis tanaman dengan memanfaatkan setiap jengkal tanah pekarangan dan tegalan secara maksimal. Mereka menanam nangka, durian, pisang, bambu, dan kayu sengon, sambil tetap menjaga lahan untuk menanam padi ladang sebagai sumber makanan utama, yaitu beras (Dachlan, 2019). Masyarakat Baduy Dalam menanam jagung sebagai tanaman sela di antara ladang padi untuk memenuhi kebutuhan makanan tambahan. Selain itu, hasil tanaman pisang juga memberikan tambahan penghasilan bagi mereka. Pisang dari desa Kanekes tergolong berkualitas baik, meskipun harganya masih lebih rendah dibandingkan dengan harga di daerah lain. Mereka menjual produk pertanian, seperti pisang, Nangka, dan buah-buahan lainnya, melalui tengkulak yang berada di sekitar terminal

Ciboleger, yang berbatasan dengan desa Kanekes. Selain itu, sumber penghidupan masyarakat Baduy lainnya diperoleh dari usaha mencari madu lebah di hutan, penjualan gula aren serta hasil pembuatan kerajinan tangan. Dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak dapat diproduksi sendiri, seperti ikan asin dan garam, mereka membelinya di pasar atau warung terdekat perkampungan (Bintari, 2012).

Oleh karena itu, untuk mendukung keberdayaan ekonomi masyarakat Baduy Dalam, maka alternatif yang dapat diwujudkan yaitu melalui partisipasi aktif masyarakat Baduy itu sendiri yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Menurut Hutapea (2022), sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah kelompok yang lemah, tidak memiliki daya, serta kekuatan untuk mengakses sumber daya produktif, termasuk masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya lokal dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal yang diyakini oleh masyarakat (Hutapea, 2022).

Menurut Hasanah (2018) mengutip dari Payne (2016) dalam bukunya yang berjudul *Modern Social Work Theory*, dijelaskan dua model pemberdayaan, yaitu model pemberdayaan dari atas ke bawah (*top down*) dan model pemberdayaan dari bawah ke atas (*bottom up*). Dalam model *top down*, sasaran pemberdayaan hanya berperan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang aktif dalam proses pemberdayaan tersebut. Kelebihan pendekatan *top-down* adalah mempercepat proses pembangunan dan memastikan pencapaian target-target yang telah ditetapkan tepat waktu. Pendekatan ini cenderung bersifat *command and control*, di mana keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kejelasan perintah dari atasan kepada bawahan, namun pendekatan *top-down* sering kali kurang

melibatkan partisipasi masyarakat, karena rakyat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Model pemberdayaan melalui pendekatan *bottom up* menuntut keterlibatan masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal guna mencapai pembangunan mandiri. Pendekatan ini mengedepankan konsep partisipasi sebagai kata kunci. Masyarakat bersama-sama merumuskan masalah dan kebutuhan yang dihadapi serta memahami sejumlah nilai dan sistem secara kolektif. Model *bottom up* dimulai dari situasi, kondisi, dan potensi lokal yang ada. Dengan demikian, model ini menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam proses pemberdayaan. Hal yang perlu dicatat bahwa pendekatan *bottom up* memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai target yang ditetapkan (Hasanah, 2018). Telah banyak program yang diberikan oleh pihak pemerintah pada masyarakat Baduy Dalam. Berbagai program pemberdayaan diberikan agar mereka memiliki akses dalam berbagai bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua program pemberdayaan mereka terima. Salah satu contoh penolakan masyarakat Baduy terhadap program pemerintah adalah terkait dengan pembangunan infrastruktur modern seperti pembangunan jalan dan penerangan listrik.

Pemerintah seringkali berupaya untuk memperluas jaringan jalan, listrik, dan sarana transportasi lainnya ke daerah Baduy guna meningkatkan konektivitas dan pelayanan publik. Masyarakat Baduy seringkali menolak pembangunan tersebut karena mereka menganggapnya akan menghancurkan kelestarian lingkungan dan mengganggu keseimbangan alam yang mereka jaga. Selain itu, masyarakat Baduy juga menolak campur tangan pemerintah dalam urusan internal mereka khususnya dalam menjalankan *Pikukuh Karuhun*. Mereka memiliki sistem tata kelola yang tradisional dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka berdasarkan adat dan kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mereka cenderung tidak ingin adanya perubahan yang dipaksakan oleh pemerintah yang dianggap dapat merusak harmoni dan integritas budaya mereka.

Dalam beberapa kasus, penolakan masyarakat Baduy terhadap program pemerintah dapat menjadi sumber ketegangan antara pihak masyarakat dan pemerintah. Tentunya bukan hal yang mudah untuk terlaksananya program pemberdayaan pada masyarakat Baduy Dalam yang memegang teguh *pikukuh* adat yang mereka yakini. Oleh karenanya perlu adanya pendekatan dari pihak *stakeholder* (pemerintah, pendamping, dan penyuluh) dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pemberdayaan yang sesuai dengan *pikukuh* adat Baduy. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam mencari model pemberdayaan ekonomi yang tepat sesuai dengan keinginan masyarakat Baduy Dalam untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana interaksi antara ekosistem alam dengan sistem sosial yang terjadi pada masyarakat Baduy Dalam?
- 2) Apa yang menjadi faktor-faktor penolakan dan penerimaan program pemberdayaan yang diberikan pada masyarakat Baduy Dalam?
- 3) Bagaimana model pemberdayaan sosial ekonomi berbasis sumber daya lokal pada masyarakat Baduy Dalam yang selaras dengan *Pikukuh Karuhun*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan sebagai berikut:

- 1) Menganalisis interaksi antara ekosistem alam dengan sistem sosial yang ada pada masyarakat Baduy Dalam
- 2) Menganalisis faktor-faktor penolakan dan penerimaan program pemberdayaan yang diberikan pada masyarakat Baduy Dalam

- 3) Menganalisis model pemberdayaan sosial ekonomi berbasis sumber daya lokal pada masyarakat Baduy Dalam yang selaras dengan *Pikukuh Karuhun*

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu yang memuat kajian pemberdayaan masyarakat pada masyarakat suku-suku di Indonesia, khususnya pemberdayaan yang berkaitan dengan masyarakat suku Baduy Dalam.

- 2) Manfaat praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai model pemberdayaan pada masyarakat Baduy Dalam yang selaras dengan *pikukuh* adat, untuk pemerintah daerah setempat khususnya. Penelitian ini juga bisa dijadikan pedoman dan rujukan bagi pemerintah atau lembaga swasta lain yang berniat untuk melakukan pemberdayaan pada masyarakat Baduy Dalam.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat

Kata “pemberdayaan” dapat diartikan sebagai “pemberkuasaan”, yang merujuk pada peningkatan kekuasaan (*power*) bagi masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (Anwar, 2018). Pemberdayaan merupakan upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan, sehingga individu atau kelompok mampu hidup secara mandiri (Hamid, 2018; Mardikanto dan Soebiato, 2019); Suharto, 2017). Menurut Suharto (2017) pemberdayaan memiliki tujuan yang meliputi:

1. Perbaiki Pendidikan, merujuk pada penumbuhan semangat belajar sepanjang hayat dalam masyarakat;
2. Perbaiki aksesibilitas, berarti dengan semangat belajar sepanjang hayat, masyarakat diharapkan memiliki akses lebih luas terhadap sumber daya;
3. Perbaiki tindakan, mengindikasikan bahwa jika pendidikan dan aksesibilitas sudah meningkat, tindakan-tindakan yang diambil pun akan semakin baik;
4. Perbaiki kelembagaan, diharapkan terjadi setelah tindakan membaik, sehingga lembaga-lembaga juga menjadi lebih baik;
5. Perbaiki usaha, mengimplikasikan bahwa dengan peningkatan pendidikan, aksesibilitas, dan kelembagaan, usaha yang dilakukan akan mengalami perbaikan;
6. Perbaiki pendapatan, diharapkan terjadi sebagai dampak dari perbaikan usaha yang dilakukan oleh masyarakat;

7. Perbaikan lingkungan, berarti bahwa peningkatan pendapatan diharapkan diikuti dengan perbaikan lingkungan, baik fisik maupun sosial;
8. Perbaikan kehidupan, menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pendapatan dan kondisi lingkungan, kehidupan setiap keluarga dan masyarakat akan menjadi lebih baik; dan
9. Perbaikan masyarakat, merupakan puncak dari semua perbaikan, yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya", yang berarti kekuatan atau kemampuan. Dari pengertian ini, pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan. Proses ini melibatkan pemberian daya dari pihak yang memiliki kemampuan kepada pihak yang kurang berdaya (Nur, 2019).

Makna "Proses" merujuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang atau belum berdaya. Proses ini melibatkan tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik dalam hal pengetahuan, sikap, maupun praktik, menuju penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang baik (Kusmana dan Garis, 2019)

Makna "memperoleh" daya, kekuatan, atau kemampuan merujuk pada inisiatif masyarakat untuk mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan, atau kemampuan tersebut, sehingga mereka memiliki keberdayaan. Kata "memperoleh" menekankan bahwa inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari ketidakmampuan atau ketidakberdayaan yang mereka alami, serta memahami pentingnya untuk mencari, mengusahakan, dan menciptakan situasi yang memungkinkan mereka memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan (Kusmana dan Garis, 2019).

Kata "pemberian" menunjukkan bahwa sumber inisiatif tidak berasal dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya, kekuatan, atau kemampuan

berasal dari pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, seperti pemerintah atau agen pembangunan lainnya (Kusmana dan Garis, 2019). Senada dengan pengertian ini, menurut Hikmat dan Sungkowo Edy dalam Nasmi dan Maani (2019) pemberdayaan memiliki dua pengertian. *Pertama*, pemberdayaan berarti memberikan kekuasaan atau mengalihkan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. *Kedua*, pemberdayaan berarti memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Menurut *United Nations Children's Fund (UNICEF)* dalam Lesnussa (2019), terdapat lima dimensi yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, yaitu kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Lima dimensi ini berfungsi sebagai kategori analisis yang dinamis, saling berhubungan secara sinergis, serta saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing dimensi:

1) Kesejahteraan

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, Pendidikan, dan kesehatan.

2) Akses

Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan dalam dimensi ini terjadi karena adanya ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya. Mereka yang berada di kelas sosial yang lebih tinggi memiliki akses lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelas rendah, yang sering kali menjadi pihak yang dikuasai. Sumber daya tersebut mencakup waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan lain-lain.

3) Kesadaran kritis

Kesenjangan dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah, melainkan merupakan hasil dari diskriminasi yang telah melembaga. Oleh karena itu, keberdayaan masyarakat di tingkat ini berarti memiliki kesadaran bahwa kesenjangan tersebut adalah konstruksi sosial yang dapat dan harus diubah.

4) Partisipasi

Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kepentingan mereka tidak terabaikan.

5) Kontrol

Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Kendali tersebut sebagai kontrol agar semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya dan bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2019) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat melalui pembelajaran bersama yang partisipatif. Proses ini diharapkan dapat mengubah perilaku individu, kelompok, dan kelembagaan yang terlibat dalam pembangunan, sehingga tercapai kehidupan yang mandiri, partisipatif, dan sejahtera secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, bebas dari ketergantungan, serta mampu berinovasi dan mengembangkan perekonomiannya ke arah yang lebih baik. Sebagai strategi pembangunan, pemberdayaan ini memfokuskan pada masyarakat sebagai subjek utama.

Pemberdayaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah tempat masyarakat tinggal (Nugraha dan Praramdana, 2022).

Ada berbagai macam pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan sebagai langkah dalam rangka meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat diantaranya, yaitu:

A) Pemberdayaan bidang pendidikan

Pendidikan merupakan kunci dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan pendidikan, masyarakat mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Oleh karena itu, pendidikan dapat meningkatkan pendapatan, kesehatan, dan produktivitas. Koswara dalam Gustian (2021), menyatakan bahwa yang perlu diperankan oleh pemerintah dalam pemberdayaan pendidikan yaitu:

- 1) Melaksanakan program peningkatan pengetahuan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
- 2) Mengembangkan keterampilan masyarakat melalui program yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai; dan
- 3) Mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.

B) Pemberdayaan bidang ekonomi

Pendapatan setiap orang merupakan salah satu faktor penting dalam kemandirian. Besaran pendapatan menjadikan salah satu indikator pemenuhan kebutuhan pokok dapat terpenuhi. Faktor ekonomi dalam sebuah kehidupan bermasyarakat menjadi penting dalam mengontrol dan mengendalikan kehidupan sesuai dengan yang individu inginkan. Menurut Supriatna dalam Gustian (2021), bahwa yang perlu diperankan oleh stakeholder dalam melakukan pemberdayaan dibidang ekonomi yaitu:

- 1) Membantu masyarakat menyediakan program-program pemberdayaan di bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan dapat dilakukan dengan

memanfaatkan keahlian dalam membuat kerajinan tangan yang dimiliki oleh masyarakat setempat sebagai contoh kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat Baduy Dalam;

- 2) Membantu masyarakat memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan ekonomi, misalnya dengan pembuatan pupuk kompos. Bahan yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan bahan yang ada di alam seperti buah-buahan yang sudah busuk, dedaunan, dan batang pohon pisang yang difermentasi secara alami untuk menjadi pupuk organik. Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan oleh *stakeholder* untuk membantu masyarakat terkait;
- 3) Membantu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui dorongan akses dan bantuan permodalan.

C) Pemberdayaan bidang kesehatan

Pemberdayaan kesehatan masyarakat merupakan proses dalam membangun masyarakat yang peduli akan kesehatannya. Tujuan pemberdayaan kesehatan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, akses, dan kontrol individu serta masyarakat terhadap kesehatan mereka sendiri. Menurut Margayaningsih (2018), pemberdayaan kesehatan yang efektif harus mencakup berbagai aspek diantaranya sebagai berikut :

- 1) Akses sarana dan prasarana kesehatan yang memadai;
- 2) Kebijakan yang diterapkan oleh pihak pemerintah untuk menangani kasus-kasus kesehatan di masyarakat;
- 3) Penyuluhan kesehatan oleh tenaga kesehatan; dan
- 4) Pengecekan kesehatan secara langsung.

2.2 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal

Model pemberdayaan ekonomi berbasis sumberdaya lokal merupakan pemberdayaan yang difokuskan pada optimalisasi potensi daerah baik dalam bentuk kekayaan alam, keterampilan tradisional yang dimiliki masyarakat, maupun budaya lokal yang dapat dikembangkan untuk menjadi sektor

ekonomi. Menurut Jatmiko (2021) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan ekonomi berbasis sumberdaya lokal, yaitu;

a) Bahan baku dan sumber daya lokal

Dalam kriteria ini menjelaskan bahwa bahan baku yang diperoleh harus dihasilkan oleh masyarakat dan sumber daya lokal yang didapatkan merupakan bahan yang bersumber dari alam sekitar;

b) Dapat dilakukan oleh sumber daya yang ada

Dalam kriteria ini menjelaskan bahwa proses pemberdayaan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan kemampuan yang mereka miliki;

c) Melibatkan penduduk lokal

Masyarakat lokal merupakan pemeran utama, sehingga keterlibatan mereka dalam proses pemberdayaan memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan.

2.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat agar mandiri. Kemandirian ini mencakup kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan mengendalikan segala tindakan yang dilakukan (Sulistiyani, 2017).

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok yang lemah dan mengalami ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini disebabkan oleh kondisi internal, seperti persepsi negatif dari masyarakat itu sendiri, serta kondisi eksternal, seperti penindasan yang berasal dari struktur sosial yang tidak adil (Fitri, 2019). Tujuan pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat agar mandiri. Kemandirian ini mencakup kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan mengendalikan tindakan mereka sendiri (Suryana, 2019).

Menurut Margayaningsih (2018), tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi potensi yang dimiliki, sehingga mereka mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih

baik melalui kegiatan swadaya. Dalam mencapai tujuan tersebut, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan formal maupun nonformal harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat akan mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri, berdaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir kosmopolitan, sehingga kesejahteraan hidup mereka dapat meningkat. (Agus Sifa', Ummah dan Amalia, 2022).

2.4 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi diawali dengan proses. Menurut Pratama (2023). Proses memberdayakan seseorang atau masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu :

- 1) Tahap penyadaran, yaitu masyarakat diberikan sosialisasi, pengetahuan atau wawasan agar mereka memahami bahwa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kasus pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD), harus diadakan usaha penyadaran untuk mengurangi rasa ketergantungan pada hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Langkah yang digunakan bisa dibuat dengan pembuatan tempat tinggal serta sosialisasi kepada masyarakat awam dan kelompok SAD agar berinteraksi dengan baik;
- 2) Tahap pengkapasitasan, yaitu tahap pemberian daya atau kuasa. Pihak pemberdaya memberikan bimbingan, pembinaan, dan pelatihan kepada SAD untuk memenuhi kebutuhan primer mereka;
- 3) Tahap pendayaan, yaitu tahap masyarakat yang akan diberdaya diberikan daya, peluang, atau otoritas sesuai dengan kecakapan yang telah dimiliki oleh masyarakat selaku penerima daya.

Menurut Bariroh, Hambali, dan Nurhadi (2020) dalam tulisannya tentang perubahan yang terencana (*planned change*) merinci tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat kedalam 7 kegiatan pokok, yaitu :

- a) Penyadaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaannya, baik keberadaan

sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, social budaya, ekonomi dan politik;

- b) Menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan. Kondisi tersebut yaitu keadaan sumberdaya (manusia, alam, sarana prasarana, kelembagaan, budaya dan aksesibilitas), lingkungan fisik/teknis, sosial budaya dan politis yang memiliki kecenderungan pada dampak penurunan keerdayaan masyarakat;
- c) Membantu pemecahan masalah, yaitu alternatif pemecahan masalah serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi;
- d) Menunjukkan pentingnya perubahan yang sedang dan akan terjadi di lingkungannya, baik lingkungan masyarakat, nasional dan global. Kondisi lingkungan terus mengalami perubahan yang semakin cepat, maka masyarakat juga harus disiapkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut;
- e) Melakukan pengujian dan demonstrasi, kegiatan uji coba dan demonstrasi ini sangat diperlukan, karena tidak semua inovasi selalu cocok dengan kondisi masyarakatnya. Selain itu, uji coba juga diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang berbagai alternatif yang paling bermanfaat dengan risiko yang terkecil;
- f) Memproduksi dan mempublikasikan informasi, baik yang berasal dari luar (seperti penelitian, kebijakan, produsen, dan pelaku bisnis) maupun dari dalam (seperti pengalaman, teknologi lokal, kearifan lokal, dan nilai-nilai adat lainnya) sangat penting. Sesuai dengan perkembangan teknologi, produk dan media publikasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik calon penerima manfaat penyuluhan;
- g) Melaksanakan pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat lapisan bawah dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bersuara, menentukan pilihan sendiri, serta

meningkatkan aksesibilitas informasi. Hal ini juga mencakup keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan, partisipasi dalam seluruh proses pembangunan, akuntabilitas publik, dan penguatan kapasitas lokal.

2.5 Faktor Penerimaan dan Penghambat Program Pemberdayaan

Program pemberdayaan dilakukan sebagai langkah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok dalam mengendalikan sumber daya dan pengambilan keputusan (Sulistiyani, 2017). Oleh karena itu pemberdayaan penting dilakukan untuk mendorong kehidupan masyarakat yang jauh lebih baik, namun dalam prosesnya pendekatan yang dilakukan dari pihak pemberdaya kepada masyarakat sering kali menghadapi kegagalan. Terdapat faktor penerimaan dan penghambat dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

A) Faktor penerimaan

1) Partisipasi Masyarakat

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pemberdayaan sangat memengaruhi penerimaan pemberdayaan. Hal ini menekankan bahwa semakin besar partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program pemberdayaan, maka semakin besar penerimaan program pemberdayaan tersebut. Selain itu, partisipasi aktif meningkatkan kepercayaan masyarakat dan komitmen terhadap program pemberdayaan (Satria, 2014).

2) Modal Sosial

Modal sosial seperti jaringan, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat memengaruhi penerimaan pemberdayaan. Masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat lebih suka bekerja sama. Kepercayaan yang ada di antara anggota masyarakat inilah yang memengaruhi proses penerimaan program pemberdayaan dapat dilaksanakan (Dulkiah, 2017).

3) Teori Kebutuhan Maslow

Berdasarkan teori Maslow, penerimaan pemberdayaan juga dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Jika kebutuhan dasar (fisiologis dan keamanan) telah terpenuhi, masyarakat cenderung lebih terbuka menerima program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi seperti harga diri dan aktualisasi diri. Program pemberdayaan yang langsung menasar kebutuhan masyarakat akan lebih mudah diterima (Pratama, 2013).

B) Faktor penghambat

1) Resistensi Perubahan

Seringkali resistensi terhadap perubahan merupakan hambatan utama dalam proses pemberdayaan. Masyarakat yang merasa terancam oleh perubahan, terutama masyarakat yang tidak memahami tujuan program pemberdayaan, cenderung menolak. Resistensi ini disebabkan oleh hal-hal seperti ketidakpastian, ketakutan kehilangan status sosial, dan keraguan terhadap orang di luar (Fringka, 2017).

2) Ketergantungan pada pihak lain

Ketergantungan menjelaskan bagaimana ketergantungan ekonomi masyarakat kepada pihak eksternal dapat menghambat pemberdayaan. Masyarakat yang terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah atau pihak luar cenderung sulit memberdayakan dirinya sendiri karena terbiasa bergantung. Akibatnya, inisiatif pemberdayaan tidak berkembang secara mandiri dan berkelanjutan (Darwis dkk, 2022).

3) Teori Struktural

Hambatan struktural seperti regulasi yang kaku, kebijakan pemerintah atau adat yang tidak mendukung dapat menjadi penghambat pemberdayaan. Teori ini menjelaskan bahwa faktor-

faktor institusional seperti kurangnya dukungan dari lembaga pemerintah, atau adanya norma-norma sosial yang menghambat inovasi, dapat menghalangi masyarakat untuk menerima pemberdayaan (Istan, 2017).

2.6 Model Pemberdayaan Masyarakat

Model dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pola, contoh, acuan, atau ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model pemberdayaan adalah pola atau ragam yang digunakan dalam proses pemberdayaan, di mana pihak yang memiliki daya memberikan dukungan kepada pihak yang kurang berdaya. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui program-program yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan pendekatan *bottom-up*. Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, semua dilakukan berdasarkan inisiatif dan aspirasi masyarakat. Proses ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan (Sulistiyani, 2017).

Menurut Anugrawati dan Pradana (2021) Model pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat meliputi pendampingan kepada warga, pelatihan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Menurut Anugrawati dan Pradana (2021), model pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan membangun kesadaran ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pencerahan kepada kelompok ekonomi rendah tentang kemampuan mereka untuk berubah. Dengan meningkatkan kapasitas diri, mereka dapat keluar dari jeratan kemiskinan.

Masyarakat berperan sebagai partisipan dalam proses pembangunan ekonomi. Melalui penyadaran, masyarakat dapat diberdayakan untuk mendorong pembangunan ekonomi dari dalam. Selanjutnya, penguatan kapasitas diperlukan agar masyarakat memiliki kemampuan yang memadai. Penguatan kapasitas dapat diberikan secara individu atau kelompok organisasi melalui pelatihan, *workshop*, dan konsultasi individual. Proses berikutnya adalah pendayaan, yaitu pemberian kekuatan kepada masyarakat

sesuai dengan kecakapan yang dimiliki. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing (Pratama, 2023).

a) Model pemberdayaan dari atas ke bawah (*top down*)

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan, dalam perspektif pembangunan ini disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmaterial sebagai suatu strategi pembangunan (Yani, 2018). Selama ini pemberdayaan dapat dilakukan dengan berbagai model pendekatan, salah satunya dengan model pendekatan dari atas ke bawah (*top down*).

Model *top down* cenderung menggunakan logika berpikir dari “atas” kemudian melakukan pemetaan “ke bawah” untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Selain itu, pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan *policy centered*, artinya dalam model pemberdayaan melalui pendekatan *top down* sasaran pemberdayaan hanya menjadi obyek dari yang akan menerima dan menikmati hasil. Pemberdayaan dilakukan oleh pihak luar dari sekumpulan objek pemberdayaan (Radiansyah dan Syiddiq, 2021).

Model *top down* mempunyai kelebihan dalam proses pembangunan untuk dapat berjalan cepat dan target-target yang telah ditetapkan dapat dicapai tepat pada waktunya. Model pendekatan ini ditentukan oleh kemampuan penyediaan dana negara atau pemberdaya (Sulistiyani, 2017). Secara garis besar kegiatan pemberdayaan *top down* dapat dikategorikan menjadi dua fase yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Pada *top down planning*, dari model perencanaan yang dilakukan adalah berasal dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya. Pengambilan keputusan dilakukan atasan dan bawahan hanya sebagai pelaksana saja (Sulistiyani, 2017). Dalam pengertian lain terkait dengan pemberdayaan, *top down planning* adalah perencanaan yang dibuat oleh

pemberdaya yang ditunjukkan kepada masyarakat sebagai pelaksana. Kemudian pendekatan ini mendesak bagian bawah bekerja sesuai kemauan atasan atau pemberdaya di dalam perencanaan tanpa memperdulikan situasi bagian bawah. Waktu perencanaan bisa sangat pendek, tetapi ada banyak hal yang terlewatkan karena sempitnya forum informasi dan komunikasi. Biasanya menimbulkan kepatuhan yang terpaksa, namun untuk sementara waktu (Radiansyah dan Syiddiq, 2021).

Pendekatan *top down* identik dengan *command and control*, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada kejelasan perintah dan cara mengatasi atasan kepada bawahan. Kelemahan model *top down*: pertama, program-program kesejahteraan yang di desain dibiayai dan dikelola secara sentralisasi ini memerlukan biaya yang sangat mahal untuk dapat berhasil, lebih dari apa yang dapat ditanggung oleh birokrasi. Kedua, program-program kesejahteraan semacam ini terlalu menguntungkan pelaksanaannya pada manajemen birokrasi yang kaku dan tidak lentur, yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya, rakyat harus menyesuaikan diri dengan apa yang akan dapat diberikan oleh birokrasi. Konsep *top down* kurang memperoleh partisipasi masyarakat, karena rakyat tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Radiansyah dan Syiddiq, 2021).

b) Model pemberdayaan dari bawah ke atas (*bottom up*)

Proses pemberdayaan menuntut adanya keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin untuk mampu melakukan pembangunan secara mandiri (Sulistiyani, 2017). Proses pendekatan itu tidaklah mudah dan cepat seperti yang diharapkan mengingat model pendekatan *top down* telah mengakar. Seiring dengan permasalahan diatas muncullah model pendekatan yang disebut *bottom up*, suatu model yang mencoba melakukan koreksi dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada model

pemberdayaan *top down*. Model pendekatan *bottom up* menggunakan konsep partisipasi dalam proses pemberdayaan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan penentuan kebijakan atau dalam pengambilan keputusan (Radiansyah dan Syiddiq, 2021).

Model pendekatan *bottom up* dalam pemberdayaan merupakan suatu pengkondisian dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pemberdayaan. Pendekatan yang dilakukan tidak berangkat dari luar melainkan dari dalam. Seperangkat masalah dan kebutuhan dirumuskan bersama oleh masyarakat serta sejumlah nilai dan sistem dipahami bersama. Model *bottom up* dimulai dengan situasi dan kondisi dari potensi lokal. Dengan kata lain, model ini menempatkan masyarakat sebagai subyek (Radiansyah dan Syiddiq, 2021).

Pendekatan *bottom up* lebih memungkinkan penggalian dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih merasa memiliki dan merasa turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan, yang notabenehnya memang untuk kepentingan mereka sendiri (Hasanah, 2018).

Pendekatan *bottom up* memberi kesan lebih manusiawi dan memberikan harapan yang lebih baik, namun tidak lepas dari kekurangannya. Model *bottom up* membutuhkan waktu yang lama dan belum menemukan bentuknya yang mapan, sehingga dapat dikatakan bahwa model pemberdayaan *bottom up* berlawanan dengan model pemberdayaan *top down*. Selain dari pengertian yang berbeda, pada model ini pun memiliki tahapan yang berbeda dengan model *top down*.

Bottom up planning adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan. Kemudian bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Pemberdayaan dengan *bottom up planning* dilakukan dengan

perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat sendiri dan pemberdaya hanya sebagai fasilitator (Hasanah, 2018)

Bottom up juga didefinisikan sebagai upaya untuk melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, serta mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya. Kelemahan dari model pendekatan ini yaitu memerlukan banyak waktu dan tenaga untuk perencanaan, karena dalam proses pendekatan seorang pemberdaya membutuhkan banyak waktu untuk dapat beradaptasi dengan masyarakat setempat agar kehadiran pemberdaya dapat diterima dengan baik.

c) Model pemberdayaan ekonomi

Model pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut Suhartini (2005) yaitu, dengan pemberian pendampingan kepada masyarakat, pemberian pelatihan, pelaksanaan monitoring, dan evaluasi. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) model pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui membangun kesadaran ekonomi masyarakat, dengan memberikan pencerahan kepada target yang akan diberdayakan, misalnya memberikan penyuluhan kepada kelompok ekonomi rendah di masyarakat tentang pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berbeda dan dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Dalam pendekatan ini, masyarakat sebagai partisipan dalam proses pembangunan ekonomi. Melalui penyadaran terhadap masyarakat, maka dapat menyadarkan mereka untuk mampu mendorong dari dalam membangun ekonomi masyarakat.

Penguatan kapasitas bertujuan untuk memberikan daya atau kuasa kepada individu atau kelompok organisasi. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan, *workshop*, dan konsultasi individual. Setelah masyarakat memperoleh kapasitas yang memadai, maka proses berikutnya adalah pendayaan, yang memberikan daya dan kekuatan

kepada target sesuai dengan kualitas kecakapan yang dimiliki. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berdaya sesuai dengan potensi masing-masing.

d) Model pemberdayaan pertanian berkelanjutan

Model pemberdayaan pertanian berkelanjutan merupakan model yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, juga menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang dari sektor pertanian. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017), terdapat beberapa model pemberdayaan pertanian yang dapat dilakukan pada masyarakat, yaitu:

- 1) *Natural farming* merupakan refleksi pengalaman dan filosofi petani Jepang. Model ini dikembangkan pada pertengahan 1940-an dengan mengenalkan filosofi hijau tentang *do nothing farming* (pertanian tanpa berbuat), yaitu suatu kegiatan pertanian yang tanpa pengolahan tanah, tanpa pemupukan, tanpa pemangkasan, dan hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja. Peningkatan produksi dilakukan melalui ketepatan waktu pembibitan, dan kombinasi pertanian.
- 2) Pertanian organik adalah model pertanian yang menggabungkan ajaran Rudolf Steiner dan biodynamic farming, dengan visi menjadikan pertanian sebagai suatu sistem yang berkelanjutan. Model ini memanfaatkan sumber daya lokal tanpa merusak lingkungan biologis, sehingga keseimbangan kehidupan organisme tetap terjaga. Dalam pertanian organik, tidak digunakan pupuk buatan, pestisida, atau bahan pengatur tumbuh. Untuk meningkatkan produktivitas hasil tani, pertanian organik memanfaatkan pupuk hijau, limbah organik, serasah, kotoran hewan, serta pengendalian hama secara biologis.

2.7 Inovasi Teknologi Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal

Inovasi dapat didefinisikan sebagai proses kegiatan atau pemikiran manusia untuk menemukan sesuatu yang baru terkait input, proses, dan *output*, yang

memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Inovasi yang berkaitan dengan *input* mencakup pola pikir dan ide-ide yang disumbangkan untuk menciptakan temuan baru. Sementara itu, inovasi yang berfokus pada proses berorientasi pada metode, teknik, atau cara kerja yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Terakhir, inovasi yang terkait dengan *output* lebih menekankan pada hasil yang dicapai, terutama melalui penerapan pola pikir dan teknik kerja yang efektif (Makmur dan Rohana, 2012).

Menurut Fontana (2011), inovasi dalam keberhasilan ekonomi terjadi melalui pengenalan cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi *input* menjadi *output*. Hal ini menghasilkan perubahan signifikan dalam perbandingan antara nilai guna yang diharapkan konsumen dari manfaat suatu produk (barang/jasa) dan harga yang ditetapkan oleh produsen. Prinsip memberdayakan sumber daya lokal merupakan pendekatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masyarakat setempat dengan mengusung partisipasi masyarakat lokal, dengan menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat setempat. Menurut Aulia dan Dharmawan (2010), kearifan lokal adalah pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tertentu, mencakup berbagai informasi kebudayaan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengetahuan ini menggambarkan pandangan masyarakat tentang struktur dan fungsi lingkungan, respons alam terhadap tindakan manusia, serta hubungan ideal antara manusia dan lingkungannya.

Penguasaan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya berbasis kearifan lokal dapat dilakukan bersama-sama, tanpa perlu intervensi dari korporasi besar yang berasal di luar daerah yang bisa melakukan penguasaan terhadap proses-proses ekonomi lokal. Masyarakat lokal dapat menikmati langsung penambahan nilai dari setiap aktivitas ekonomi yang diciptakannya tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal yang mereka miliki.

2.8 Dampak Pemberdayaan Masyarakat

Setiap program pemberdayaan harus memberikan dampak atau implikasi kepada sasaran yang diberdayakan. Dampak ekonomi menjadi acuan utama dalam menilai keberhasilan sebagian besar program pemberdayaan.

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui kemampuan mereka dalam aspek ekonomi, akses terhadap manfaat kesejahteraan, serta kemampuan dalam bidang budaya dan politik.

Secara etimologis dampak artinya pelanggaran, tubrukan atau benturan.

Menurut Soekanto dalam Hasanah (2018) dampak sosiologis dapat diartikan sebagai penerapan konsep dasar untuk menganalisis gejala sosial, di mana dampak sosial merupakan efek dari fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dampak sosial dikategorikan menjadi dua, yaitu dampak ekonomi dan dampak sosial. Pertama, dampak ekonomi berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk dampak ekonomi adalah kemudahan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi. Sumber-sumber ekonomi ini mencakup sumber ekonomi alam, sumber yang berasal dari manusia, sumber buatan manusia, serta pengusaha atau pihak yang berinisiatif menggabungkan dan mengoordinasikan ketiga sumber tersebut (Suharto, 2017).

Kedua, dampak sosial adalah kajian mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan di suatu wilayah (Hasanah, 2018). Perubahan lingkungan sosial ekonomi mencakup peningkatan pendapatan dan pergeseran mata pencaharian masyarakat.

Keberdayaan masyarakat dalam perspektif ekonomi dapat lebih jelas dilihat dari beberapa aspek berikut :

a) Peningkatan pendapatan

Program pemerintah berhasil meningkatkan penghasilan masyarakat yang awalnya rendah. Dampak sosial ekonomi dari program yang benar adalah pemberdayaan yang berkelanjutan, yang memungkinkan masyarakat meningkatkan pendapatan harian mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b) Pergeseran okupasi

Pergeseran mata pencaharian dalam masyarakat merupakan bentuk perubahan sosial ekonomi yang mempengaruhi fungsi individu. Perubahan ini memberikan peluang bagi seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik secara berkelanjutan. Pergeseran okupasi ini berkaitan dengan usaha memperoleh pendapatan melalui aktivitas kerja, sehingga masyarakat dapat mengakses pekerjaan yang lebih baik (Suharto, 2017). Sejalan dengan pendapat Swift dan Levin dalam Mardikanto dan Soebiato (2017) masyarakat yang berdaya memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan serta memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Pemberdayaan merupakan upaya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup mereka, baik dari segi ekonomi, sosial, lingkungan, mental, dan lainnya. Peningkatan ekonomi masyarakat menjadi fokus utama bagi pembuat program dan masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan sering kali dipicu oleh kebutuhan mereka akan jenis program yang akan dilaksanakan. Kebutuhan ini, meskipun mencakup banyak aspek, biasanya berfokus pada peningkatan ekonomi.

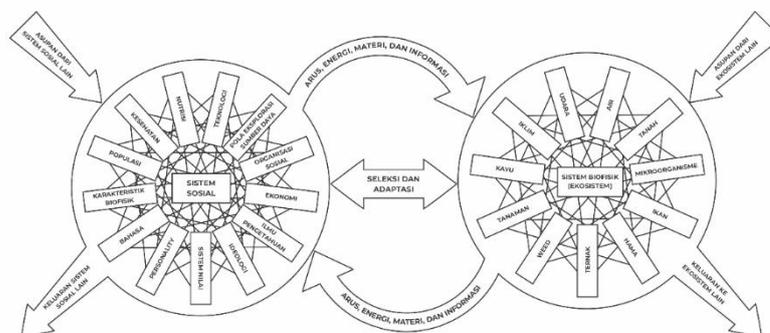
Peningkatan ekonomi dapat ditandai oleh beberapa indikator, seperti meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Salah satu tujuan pemberdayaan adalah memperbaiki pendapatan, yang diharapkan dapat dicapai melalui perbaikan bisnis. Dengan demikian, perbaikan tersebut diharapkan akan meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. (Mardikanto dan Soebiato, 2019).

2.9 Ekologi Manusia Terry Rambo

Terry Rambo menawarkan model ekologi manusia yang terdiri dari dua subsistem, yaitu ekosistem alam dan sistem sosial, yang saling berinteraksi.

Dalam model ini, Rambo menjelaskan bahwa kedua sistem, baik sosial maupun ekosistem, saling beradaptasi untuk mempertahankan integritas masing-masing dengan mengubah susunan strukturalnya sesuai dengan dinamika internal. Kedua sistem ini menerima input energi, materi, dan informasi dari sistem lain, yang turut memengaruhi struktur dan fungsinya. Hubungan timbal balik yang erat antara kedua sistem tersebut berjalan baik dan teratur karena adanya keseimbangan dalam arus energi, materi, dan informasi (Rambo, 1983).

Model ekologi manusia menekankan empat hal penting. *Pertama*, terdapat input dari ekosistem ke dalam sistem sosial, yang dapat berupa energi (seperti makanan dan bahan bakar), materi (unsur-unsur pembangunan), atau informasi (seperti suara dan stimulus visual). *Kedua*, sistem sosial juga memberikan *input* ke ekosistem, yang berupa energi, materi, atau informasi hasil aktivitas manusia. *Ketiga*, perubahan pada lembaga dapat mengubah sistem sosial sebagai respons terhadap *input* dari ekosistem, contohnya peningkatan laju kematian akibat penyakit menular dapat mengubah struktur populasi suatu masyarakat. *Keempat*, ekosistem juga mengalami perubahan sebagai respons terhadap input dari sistem sosial. Manusia beradaptasi terhadap pengaruh lingkungan, sementara ekosistem berubah sebagai respons terhadap aktivitas manusia. Perubahan sistem sosial yang merespons input dari ekosistem biasanya bersifat adaptif, sehingga kontribusinya mendukung keberlanjutan sistem sosial dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan. (Bakri dkk, 2023). Model ekologi manusia menurut Terry Rambo dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Hubungan timbal balik sistem sosialnya dengan ekosistem (Rambo, 1983)

2.10 Masyarakat Suku Baduy

Penduduk Desa Kanekes di lereng Pegunungan Kendeng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sering disebut dengan istilah Baduy atau Urang Baduy.

Ada beberapa alasan mengapa istilah ini digunakan. Pertama, nama Baduy diambil dari Gunung Baduy yang berada di wilayah mereka. Kedua, istilah ini mungkin berasal dari kata “baduyut”, sejenis pohon beringin yang tumbuh banyak di hutan sekitar Baduy. Ketiga, istilah Baduy juga disamakan dengan komunitas Badawi di Arab, karena kebiasaan mereka yang sering berpindah-pindah seperti orang Badawi (Sihabudin, 2017).

Perkampungan masyarakat Baduy umumnya terletak di daerah aliran Sungai Ciujung, di pegunungan Kendeng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Lokasinya sekitar 172 km barat dari Jakarta, 65 km selatan dari Serang, 38 km selatan dari Rangkasbitung, dan 17 km selatan dari Leuwidamar (Bahrudin dkk, 2021). Suku Baduy di Desa Kanekes hidup terpisah dari suku lain dan dalam keseharian mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda, namun beberapa anggota suku Baduy Luar sudah mampu menggunakan bahasa Indonesia saat berinteraksi dengan pendatang dari luar daerah.

Masyarakat Baduy merupakan bagian dari Suku Sunda dan diyakini sebagai keturunan Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran pada abad ke-15 dan 16. Pada masa itu, wilayah Banten merupakan bagian penting dari Kerajaan Pajajaran, dengan pusat pemerintahan di Pakuan (sekarang wilayah Bogor). Dalam sejarah Nusantara, Banten dikenal sebagai penghasil rempah-rempah dan menjadi pelabuhan dagang yang besar pada masa ekspedisi pertama Belanda. Sungai Ciujung, yang dapat dilayari oleh berbagai jenis perahu, digunakan untuk mengangkut hasil bumi dari pedalaman. Penguasa wilayah, seperti Pangeran Pucuk Umum, memanfaatkan sungai ini sebagai jalur transportasi utama guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, Pangeran Pucuk Umum menekankan pentingnya menjaga kelestarian sungai untuk keberlanjutan ekonomi. Oleh karena itu, pasukan tentara kerajaan yang terlatih diperintahkan untuk menjaga dan mengelola

kawasan hutan lebat dan perbukitan di wilayah Gunung Kendeng. Keberadaan pasukan ini menjadi cikal bakal terbentuknya masyarakat Baduy, yang hingga kini masih mendiami wilayah hulu Sungai Ciujung di Gunung Kendeng. Suku Baduy merupakan masyarakat yang memiliki kekhasan dalam berbagai aspek, yang menjadi identitas mereka dalam menjalani kehidupan. Kekhasan tersebut membuat mereka seolah memiliki dunia sendiri dengan fondasi peradaban yang kokoh (Muhibah dan Rohimah, 2023).

Pada masyarakat Baduy, istilah “Baduy Tangtu” digunakan untuk menyebut “Baduy Dalam”, sementara “Baduy Panamping” merujuk pada “Baduy Luar”. Masyarakat Baduy Dalam merepresentasikan pewaris asli budaya dan amanat leluhur mereka. Mereka menjaga ketaatan dan kesadaran tinggi dalam melestarikan adat istiadat serta menolak pengaruh luar yang dianggap negatif. Orang Baduy sendiri sebetulnya lebih senang jika disapa atau menyebut dirinya dengan *Urang Kanekes* (Nadroh, 2018). Mereka sering menyebut asal dan wilayah kampung mereka, seperti *Urang Cibeo* (kampung di Baduy Tangtu), *Urang Tangtu* (Baduy Tangtu), *Urang Panamping* (Baduy Panamping), dan *Urang Gajeboh* (kampung di Baduy Panamping). Sebutan lain yang menegaskan identitas mereka sebagai orang Sunda pertama adalah “*Urang Sunda Wiwitan*”. Istilah ini kini jarang digunakan dan hanya dipakai untuk menyebut agama mereka, Sunda Wiwitan. Sebutan “Orang Baduy” lebih umum digunakan, mereka sekarang lebih sering menyebut diri sebagai Orang Baduy.

Masyarakat Baduy menjelaskan bahwa “Baduy Luar” merupakan komunitas yang awalnya bagian dari “Baduy Dalam” yang dianggap melanggar aturan adat, kemudian dipindah ke wilayah “Baduy Luar”. Terdapat juga informasi dan beberapa literatur diantaranya seperti yang dijelaskan dalam penelitian Nadroh (2018) bahwa Suku “Baduy Luar” merupakan komunitas Baduy yang dipersiapkan sebagai penjaga, penyangga, penyaring, pelindung dan sekaligus penyambung silaturahmi dengan pihak luar sebagai bentuk penghargaan, kerja sama, dan partisipasi aktif dalam kegiatan kenegaraan

untuk menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu suku bangsa yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara Indonesia lainnya. Keberadaan dua pengistilahan ini juga terlihat dari segi pakaian yang dikenakan setiap hari sebagai identitas mereka. Suku Baduy Dalam biasanya berpakaian putih dengan ikat kepala putih dan Baduy Luar berpakaian dengan warna biru atau hitam.

Suku Baduy kental dengan aturan adat, maka dalam aktivitas kesehariannya terikat dengan aturan adat. Berdasarkan hasil wawancara dan berdasarkan penelitian yang dilakukan Nadroh (2018), Suku Baduy memiliki sistem kepemimpinan yang disebut dengan *kePuunan*. Dalam sistem ini, masyarakat Suku Baduy patuh dan tunduk kepada para Puun, yang merupakan pemimpin tertinggi. Para *Puun* ini tinggal di tiga wilayah utama, yaitu Cikeusik, Cibeo, dan Ciketawarna, dan dianggap sebagai satu kesatuan pemimpin tertinggi di masyarakat Baduy. Mereka bertanggung jawab untuk menentukan waktu tanam, masa panen, serta menegakkan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Baduy.

Suku Baduy mempunyai sistem keyakinan yang kental dengan animisme dan dinamisme. Keyakinan tersebut dikenal dengan sebutan *Sunda Wiwitan*. Nadroh (2018) mengungkapkan bahwa dalam agama *Sunda Wiwitan*, kekuasaan tertinggi diyakini berada pada *Nu Ngersakeun* (Yang Menghendaki), *Sang Hyang Kersa* (Yang Maha Kuasa), atau *Batara Tunggal* (Yang Maha Esa). Kepercayaan ini, yang berakar pada animisme dan dinamisme, merupakan ajaran leluhur yang menekankan penghormatan kepada karuhun atau arwah leluhur serta pemujaan kepada roh kekuatan alam. Masyarakat Baduy menganggap *Panembahan Arca Domas* atau *Sasaka Domas*, yang terletak di hulu Sungai Ciujung, sebagai tempat keramat dan kiblat bagi mereka. Setiap tahun, orang Baduy mengunjungi tempat tersebut untuk pemujaan yang diadakan pada bulan kalima. Dalam proses pemujaan ini, hanya Puun yang terlibat, bersama beberapa anggota masyarakat yang terpilih.

Lingkungan *Arca Domas* menyimpan peninggalan zaman megalitikum berupa bangunan berundak dengan *menhir* dan arca di atasnya. Selain itu, juga terdapat batu *lumpang*, yaitu batu berbentuk cekungan yang menampung air hujan. Masyarakat Baduy meyakini bahwa ketika batu *lumpang* tersebut penuh dengan air hujan, mereka akan mendapatkan berkah panen yang melimpah, namun jika air di dalamnya sedikit atau kering, mereka percaya akan menghadapi kegagalan panen. Berdasarkan aspek sejarah, geografi, dan sistem kepercayaan, masyarakat Suku Baduy masih sangat tradisional, dengan kearifan lokal yang unik sebagai identitas mereka. Tantangan utama yang mereka hadapi saat ini adalah bagaimana mempertahankan kebudayaan dan keberadaan mereka di tengah perubahan zaman.

2.11 Masyarakat Baduy Dalam dan Masyarakat Baduy Luar

Masyarakat Baduy terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Secara umum, pola hidup kedua kelompok ini mirip, termasuk pola makan dan bentuk rumah yang seragam, yaitu *nyulah-nyanda* (utara-selatan). Keduanya juga memiliki larangan untuk bersekolah, namun terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar (Kurnia dan Sihabudin, 2010).

Perbedaan mencolok ini disebabkan oleh interaksi sosial yang berlangsung terus menerus antara masyarakat luar Baduy dan masyarakat Baduy Luar, serta adanya kelonggaran terhadap *pikukuh* yang diterapkan pada mereka. Akibatnya, masyarakat Baduy Luar mengalami pergeseran budaya. Meskipun sebelumnya mereka sangat mematuhi *pikukuh* yang ada, kini mereka perlahan-lahan berani melanggarnya, meskipun menurut pandangan mereka hal itu masih dalam batasan yang wajar.

Masyarakat Baduy Dalam menerapkan *pikukuh* dengan sangat ketat. Mereka dilarang memiliki dan menggunakan barang-barang elektronik, serta alat makan dan minum yang terbuat dari gelas, plastik, dan produk rumah tangga lainnya yang berasal dari luar, yaitu teknologi modern.

Dalam hal konstruksi, rumah-rumah tidak boleh menggunakan paku, sebaliknya mereka hanya boleh menggunakan pasak dan tali dari rotan serta memiliki satu pintu. Selain itu, masyarakat Baduy Dalam dilarang menggunakan alas kaki, baik sandal maupun sepatu, dan dilarang bepergian dengan kendaraan jenis apa pun. Oleh karena itu, mereka menolak segala bentuk perilaku dan pola hidup yang bertentangan dengan *pikukuh* karuhun mereka. Siapa pun yang melanggar akan menerima sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan (Kurnia dan Sihabudin, 2010).



Gambar 2. Peneliti bersama Orang Tangtu (Orang Baduy Dalam)
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

Berbeda dengan masyarakat Baduy Dalam, masyarakat Baduy Luar merupakan kelompok yang disiapkan oleh adat untuk menjaga, menopang, menyaring, melindungi, dan menjalin silaturahmi antara pihak adat dan pihak luar. Hal ini merupakan bentuk penghargaan, kerja sama, dan partisipasi aktif dalam kegiatan kenegaraan, yang menunjukkan bahwa masyarakat Baduy memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya (Kurnia dan Sihabudin, 2010).

Baduy Luar memiliki pola hidup yang sudah mulai longgar dan juga terbuka. Mereka pun diberikan kelonggaran dalam menjalani *pikukuh* dibandingkan dengan masyarakat Baduy Dalam. Masyarakat Baduy Luar sudah mulai mengadopsi pola hidup maupun gaya hidup masyarakat luar Baduy ke dalam pola hidup mereka sehari-hari walaupun mereka masih selalu menampilkan ciri khas kesukuan mereka. Selain itu, desain dan tata ruang rumah mereka pun sudah mulai bervariasi termasuk jumlah ruangan,

jumlah pintu, corak bilik dan jendela, dan mereka diperbolehkan menggunakan paku. Mereka juga dibolehkan untuk berpergian menggunakan jasa transportasi, maka tidak heran jika pola hidup masyarakat Baduy Luar sudah mulai bergeser dan sedikit demi sedikit mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan mereka (Kurnia dan Sihabudin, 2010).



Gambar 3. Peneliti bersama Orang *Panamping* (orang Baduy Luar)
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2023

Perbedaan lainnya antara Baduy Dalam dan Baduy Luar adalah pakaian adat yang mereka pakai sehari-hari. Baduy Dalam menggunakan pakaian berwarna putih dan biru tua serta memakai ikat kepala berwarna putih. Baduy luar menggunakan pakaian berwarna hitam dengan ikat kepala berwarna hitam. Baju yang dipakai Baduy Dalam disebut oblong, sedangkan Baduy Luar disebut dengan kampret. Kain yang digunakan oleh Baduy Dalam disebut kain aros, ikat kepala yang digunakan oleh Baduy Dalam disebut telekung, ikat kepala yang digunakan oleh masyarakat Baduy Luar disebut dengan lomar. Tas yang digunakan oleh Baduy Dalam disebut gandong.

2.12 *Pikukuh* Baduy

Hukum adat di Baduy dikenal sebagai *pikukuh*, yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat agar menjalani kehidupan sesuai dengan norma yang benar. *Pikukuh* merupakan aturan yang diwariskan oleh *karuhun* (leluhur) dan harus dipatuhi serta dilaksanakan oleh masyarakat

Baduy. Adat dipandang sebagai sistem nilai penting dalam kehidupan mereka, berfungsi sebagai patokan perilaku dan tata kelakuan yang menentukan kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan yang dilakukan masyarakat Baduy harus berlandaskan pada adat, dan penilaiannya pun harus bersumber dari norma-norma adat tersebut (Kurnia dan Sihabudin, 2010).

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh karuhun harus dilaksanakan oleh masyarakat Baduy dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat selalu berada di bawah pengawasan dan bimbingan *Puun* sebagai ketua adat. *Puun*, sebagai wakil para leluhur, bertugas membimbing masyarakat Baduy untuk hidup sesuai dengan jalan yang benar, yaitu dengan menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah diamanatkan oleh para leluhur. Hal tersebut sesuai dengan *pikukuh* yang diwariskan oleh leluhur masyarakat Baduy yaitu:

“*AMANAT BUYUT*”

<i>Buyut nu dititipkeun ka Puun</i>	Tabu yang dititipkan kepada <i>Puun</i>
<i>Nagara satelung puluh telu</i>	Negara tiga puluh tiga
<i>Bangawan sawidak lima</i>	sungai enam puluh lima
<i>Pancer salawe negara</i>	pusat dua puluh negara
<i>Gunung teu meunang dilebur Lebak</i>	gunung tak boleh dihancurkan
<i>teu meunang dirusak Larangan teu</i>	lembah tak boleh dirusak
<i>meunang dirempak Buyut teu</i>	larangan tak boleh dilanggar
<i>meunang dirobah</i>	buyut tak boleh dirubah
<i>Lojor teu meunang dipotong Pondok</i>	panjang tak boleh dipotong
<i>teu meunang disambung Nu lain</i>	pendek tak boleh disambung
<i>kudu dulainkeun</i>	yang bukan harus ditiadakan
<i>Nu ulah kudu diulahkeun</i>	yang jangan harus dinafikan
<i>Nu enya kudu dienyakeun</i>	yang benar harus dibenarkan (Kurnia dan Sihabudin, 2010).

Masyarakat Baduy menanamkan nilai-nilai kehidupan, termasuk *pikukuh karuhun*, dengan memperkenalkan konsep tersebut kepada anak-anak. Setiap orang tua di Baduy memiliki kewajiban untuk mengajarkan *pikukuh* kepada anaknya sejak mereka mulai mengenal lingkungan. Dalam

pandangan masyarakat Baduy, jika seorang anak melanggar *pikukuh*, orang tua mereka akan disalahkan karena dianggap tidak berhasil mendidik anak sesuai dengan aturan adat yang telah ditetapkan (Kurnia dan Sihabudin, 2010). Setiap bulan, masyarakat Baduy mengadakan acara kumpulan adat yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat. Acara ini bertujuan untuk menjelaskan dan menyampaikan hukum adat Baduy kepada masyarakat. Pengetahuan yang paling penting dalam kumpulan adat tersebut adalah mengenai akhlak dan etika.

Masyarakat Baduy memiliki aturan adat yang secara turun temurun mereka jalankan sebagai bentuk kepatuhan pada adat. Menurut Kurnia dan Sihabudin (2010) aturan yang harus diikuti pada masyarakat Baduy yaitu:

1. Masyarakat Baduy tidak diperbolehkan bersekolah;
2. Mereka dilarang memelihara ternak berkaki empat seperti kerbau, kambing, sapi, dan kuda;
3. Masyarakat Baduy Dalam tidak diperkenankan bepergian dengan kendaraan;
4. Mereka juga tidak boleh menggunakan peralatan elektronik;
5. Masyarakat Baduy dilarang menggunakan perabotan rumah tangga yang mewah; dan
6. Poligami dan poliandri tidak diperbolehkan dalam masyarakat ini.

Mereka tidak boleh menanam kopi atau teh karena dianggap barang kotor (Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya, dan Pariwisata Kabupaten Lebak, 2004). Aturan tersebut diantaranya:

1. Masyarakat Baduy Dalam tidak diperkenankan menggunakan alas kaki;
2. Pintu rumah harus menghadap ke utara atau selatan, kecuali untuk rumah Puun;
3. Masyarakat Baduy Dalam dilarang menggunakan kain atau baju yang dijahit oleh mesin;

4. Mereka hanya diperbolehkan mengenakan pakaian berwarna hitam atau putih yang ditenun dan dijahit sendiri, serta dilarang memakai pakaian modern;
5. Pembunuhan tidak diperbolehkan;
6. Mereka dilarang makan pada waktu malam;
7. Masyarakat Baduy tidak boleh mengonsumsi makanan atau minuman yang haram;
8. Mereka dilarang berduaan dengan lawan jenis;
9. Zina dilarang;
10. Mencuri tidak diperbolehkan;
11. Berbohong dilarang;
12. Pelanggaran adat tidak diperkenankan;
13. Meminta-minta atau mengemis pada orang lain dilarang; dan
14. Menyakiti binatang dan merusak tanaman tidak diperbolehkan.

Suku Baduy melarang anggotanya untuk bersekolah bukan tanpa alasan. Mereka percaya bahwa sekolah dapat merusak tatanan adat yang telah ada sejak lama. Mereka beranggapan bahwa orang yang berpendidikan tinggi seringkali menjadi korban dari kepintarannya sendiri dan dapat memengaruhi orang lain. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pendidikan akan mendorong mereka mengejar kekayaan, karena kepuasan dan kemajuan hidup tidak memiliki batas. Mereka juga khawatir bahwa seseorang yang berpendidikan akan sulit mengendalikan kepintaran yang dimilikinya. Ayah Mursid (Tokoh Baduy) menjelaskan alasan mengapa Baduy melarang masyarakatnya untuk bersekolah yaitu:

Kahiji, mun bicara pendidikan formal berarti resmi hukumna, kudu aya guruna, bangunanana, biayana jeung paten jadwalna, sedengkeun di masyarakat kami sapopoena pinuh ku kagiatan Adat nu wajib dilaksanakeun ku satiap warga nyaeta ngahuma atawa berladang jeung kagiatan sejena, jadi lamun masyarakat adat sarakola formal dipastikeun kagiatan Adat loba katunda. Kadua, tanah adat teu meunang dirobah termasuk bentuk imah atawa bangunan, jadi mun dibangun sakola di tanah ulayat geus pasti bertentangan jeung aturan pokok Adat. Katilu, di masyarakat adat mah teu meunang loba ajaran bisi poho kana dasar-dasar ajaran hukum wiwitan, mun loba paham jeung

ajaran masyarakat kami bisa kena ku godaan nu teu sairing jeung ajaran Adat istiadat nu akhirna nimbulkeun kakisruhan. Kaopat, kami ka amanatan kudu hirup sederhana supaya tetap sapamadegan tur sauyunan, lamun kami dibere kebebasan keur neangan ilmu pengetahuan jeung kamajuan pasti terjadi persaingan hirup, sedangkeun eta pengetahuan jeung kamajuan hirup eweuh batasna, akhirna manusia terus berlomba-lomba tuluy poho kana wiwitan jeung tujuan hirup nu aslina (Kurnia dan Sihabudin, 2010).

Artinya:

Pertama, kalau berbicara pendidikan secara formal berarti resmi hukumnya, harus ada gurunya, bangunannya, biayanya, serta jadwal yang pasti atau tetap. Keseharian masyarakat Baduy penuh dengan kegiatan adat yang wajib dilaksanakan oleh setiap warga tanpa kecuali, yaitu berladang serta kegiatan adat lainnya. Jadi kalau masyarakat adat ikut sekolah formal, dipastikan kegiatan adat banyak yang tertunda atau terganggu. *Kedua*, tanah adat tidak boleh diubah termasuk bentuk rumah atau bangunan, jadi kalau dibangun sekolah yang permanen di tanah Ulayat dipastikan bertentangan dengan hukum adat yang pokok. *Ketiga*, di masyarakat adat tidak boleh banyak ajaran karena dikhawatirkan akan lupa pada dasar ajaran hukum wiwitan. *Keempat*, kami mendapat amanah harus hidup sederhana supaya tetap sekeyakinan dan kebersamaan, jika di Baduy diberi kebebasan untuk mencari ilmu pengetahuan dan kemajuan tidak ada batasnya, akhirnya manusia terus berlomba-lomba dan lupa *wiwitan* serta tujuan hidup yang sebenarnya.

2.13 Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian untuk menjadi pembanding dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, juga untuk mempermudah dalam pengambilan data dan metode yang digunakan. Kajian penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No.	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sihabudin, 2017	Keberhasilan Program Keluarga Berencana Pada Kelompok Masyarakat Adat Terpencil Baduy di Kabupaten Lebak Banten	Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemenuhan kebutuhan kesehatan ibu khususnya penerimaan konsep Keluarga Berencana (KB) pada masyarakat Baduy Luar. Data menunjukkan peningkatan akseptor KB di Baduy dari tahun 2006 hingga tahun 2014. Dari data tersebut dapat disimpulkan keberhasilan program Keluarga Berencana pada masyarakat Baduy. Berkat kegigihan dan kerja keras dari tenaga kesehatan yang telah ditugaskan untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu masyarakat Baduy.
2	Jamaluddin dkk, 2019	Strategi dan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Sumatera Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat miskin tidak berdaya dan posisinya lemah disebabkan faktor kemiskinan, kelemahan fisik (jasmani), isolasi, kerentanan dan ketidakberdayaan. Strategi pemberdayaan masyarakat miskin di Sumatera Utara yaitu melalui program penguatan kebutuhan, penguatan sumber daya manusia, penguatan institusi, penguatan akses komunikasi dan informasi, penguatan jaringan, kemitraan, dan penguatan partisipasi. Model pemberdayaan masyarakat miskin yang efektif dilaksanakan di Sumatera Utara adalah <i>Advantage and Change Model (ACM)</i> , yaitu model pemberdayaan

Tabel 1. Lanjutan

No.	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			yang memberi faedah (bukan mudharat) bagi pemerintah dan menghasilkan perubahan atau perbaikan bagi masyarakat miskin.
3	Sujana, 2020	<i>Pikukuh</i> : Kajian Historis Kearifan Lokal Pitutur Dalam Literasi Keagamaan Masyarakat Adat Baduy	Hasil kajian menunjukkan bahwa tradisi masyarakat adat Baduy diwarnai oleh kepercayaan yang dianutnya yaitu <i>Sunda Wiwitan</i> , melahirkan ajaran tersendiri yang disebut <i>pikukuh</i> . <i>Pikukuh</i> tersebut disampaikan secara turun temurun secara lisan menjadi aturan adat mutlak yang harus ditaati. Berbagai makna filosofis hidup (kedamaian, kejujuran, kesederhanaan, kasih sayang) dijadikan landasan hidup masyarakat Baduy, mereka akan selalu menjaga dan mengamalkan <i>pikukuh</i> tersebut sampai kapanpun. Dengan melaksanakan <i>pikukuh</i> masyarakat Baduy akan dilindungi oleh Batara Tunggal sebagai kuasa tertinggi dalam keyakinan masyarakat Baduy melalui para guriang (utusan Batara Tunggal) yang dikirim oleh karuhun (leluhur). Demikian juga, penderitaan hidup yang dialami adalah hukuman dari karuhun dan Batara Tunggal karena tidak patuh kepada <i>pikukuh</i> .
4	Muchlis dkk, 2021	Akulturasi Material Pada Proses Pembuatan Tas <i>Koja</i> dan Dampaknya Terhadap Aturan Adat Istiadat Suku Baduy	Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa (1) kehidupan suku Baduy tidak mengalami sedikit perubahan yang disebabkan adanya modernisasi dan akibat terjadinya akulturasi pada bahan tas <i>koja</i> , namun tentu saja perubahan tersebut masih dirasakan oleh Suku Baduy; (2) Sebelum terjadi akulturasi bahan, Suku Baduy hanya mengenal bahan tas <i>koja</i> yang terbuat dari tumbuhan terureup; (3) Terjadinya akulturasi material sangat mempengaruhi perekonomian, namun tidak dengan perubahan penggunaan tas <i>koja</i> itu sendiri bagi Suku Baduy; dan (4) Akulturasi bahan membawa perubahan sifat, arti dan makna dari tas <i>koja</i> itu sendiri.

Tabel 1. Lanjutan

No.	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5	Nadroh, 2018	<i>Pikukuh Karuhun</i> Baduy Dinamika Kearifan Lokal di Tengah Modernitas Zaman	Hasil penelitian menunjukkan nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia sebenarnya. Masyarakat Baduy yang taat kepada nenek moyang, menghargai alam dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat Suku Baduy percaya bahwa hidup adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Baduy menganut paham <i>pikukuh</i> dan <i>pitutur</i> “ <i>Lojor teh meunang dipotong, Pondok Teu meunang disambung</i> ” (Panjangnya tidak boleh dipotong, pendek tidak dapat dihubungkan)
6	Nasarudin dan Siti Ahyuni, 2023	Strategi Pendampingan Industri Kreatif Menengah Kerajinan Baduy Berbasis <i>local wisdom</i> : Tinjauan Model <i>triple helix</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerajinan Suku Baduy memiliki potensi yang besar dalam pengembangan industri kreatif, dinamika sosial yang tinggi menghasilkan tenaga kerja yang inovatif dan kreatif sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi oleh industri kreatif Suku Baduy dapat diatasi dengan program pendampingan usaha melalui pendekatan <i>triple helix</i> dalam mendukung daya saing di industri kreatif di Provinsi Banten.
7	Dewantara, 2019	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Kampung Baduy, Banten	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan wisata di Suku Baduy maka perlu melakukan lima tahap dalam pemberdayaan masyarakat Baduy antara lain kesadaran, pembentukan perilaku, transformasi dan kemampuan intelektual. Selain itu juga pentingnya peran lima <i>stakeholder</i> pariwisata di luar masyarakat adat Baduy, yaitu akademisi, pelaku wisata perjalanan, pemerintah lokal dan kabupaten serta provinsi, masyarakat desa penyokong kampung Baduy, dan media dalam menjaga prinsip pemberdayaan

masyarakat Baduy.

Tabel 1. Lanjutan

No.	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
8	Sumawijaya dkk, 2020	Implementasi Kebijakan Pembangunan Suku Baduy Kabupaten Lebak Provinsi Banten	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang dikeluarkan pihak pemerintah mempengaruhi kondisi masyarakat Baduy yang selama ini terisolir dan tertinggal karena keterbatasan pembangunan fisik maupun non fisik mulai terbuka dengan masyarakat luar. Pendekatan <i>bottom-up</i> merupakan yang paling tepat untuk digunakan dalam upaya penanggulangan pembangunan masyarakat Baduy, dimana masyarakat diposisikan sebagai pelaku (subjek) pembangunan yang diharapkan mempunyai pengaruh positif terhadap proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri dalam upaya untuk membangun kemandirian.
9	Donna, dan Budiati, 2022	Perubahan sosial <i>Pikukuh Karuhun</i> masyarakat suku Baduy di Tengah Modernisasi	Faktor perubahan sosial <i>Pikukuh Karuhun</i> masyarakat Baduy ialah: Pertama, terjadi karena pengaruh budaya modern yang dibawa wisatawan yang datang ke Suku Baduy. Pengaruh budaya modern menggeser budaya lokal seperti <i>Pikukuh Karuhun</i> hal ini yang membuat masyarakat Baduy saat ini tidak taat dan banyak melanggar aturan-aturan adat Baduy. Kedua ialah faktor kebutuhan ekonomi masyarakat Baduy, kebutuhan masyarakat yang setiap hari semakin meningkat tidak sejalan dengan penghasilan yang
10	Dachlan, 2019	Kehidupan Ekonomi Masyarakat Baduy Di Desa Kanekes Banten	Sistem perekonomian masyarakat Baduy sejak sekitar tahun 1970 telah sepenuhnya mengenal ekonomi pasar dengan mengenakan mata uang sebagai alat tukar, Sistem barter telah ditinggalkan, kecuali untuk keperluan terbatas dalam lingkungan kekerabatan saja. Kehidupan ekonomi masyarakat Baduy Dalam menyandarkan pada produksi pertanian padi huma dan beberapa tanaman lain serta berdagang dari hasil produksi pertanian untuk memenuhi

kebutuhan yang tidak bisa mereka buat seperti ikan asin dan garam.

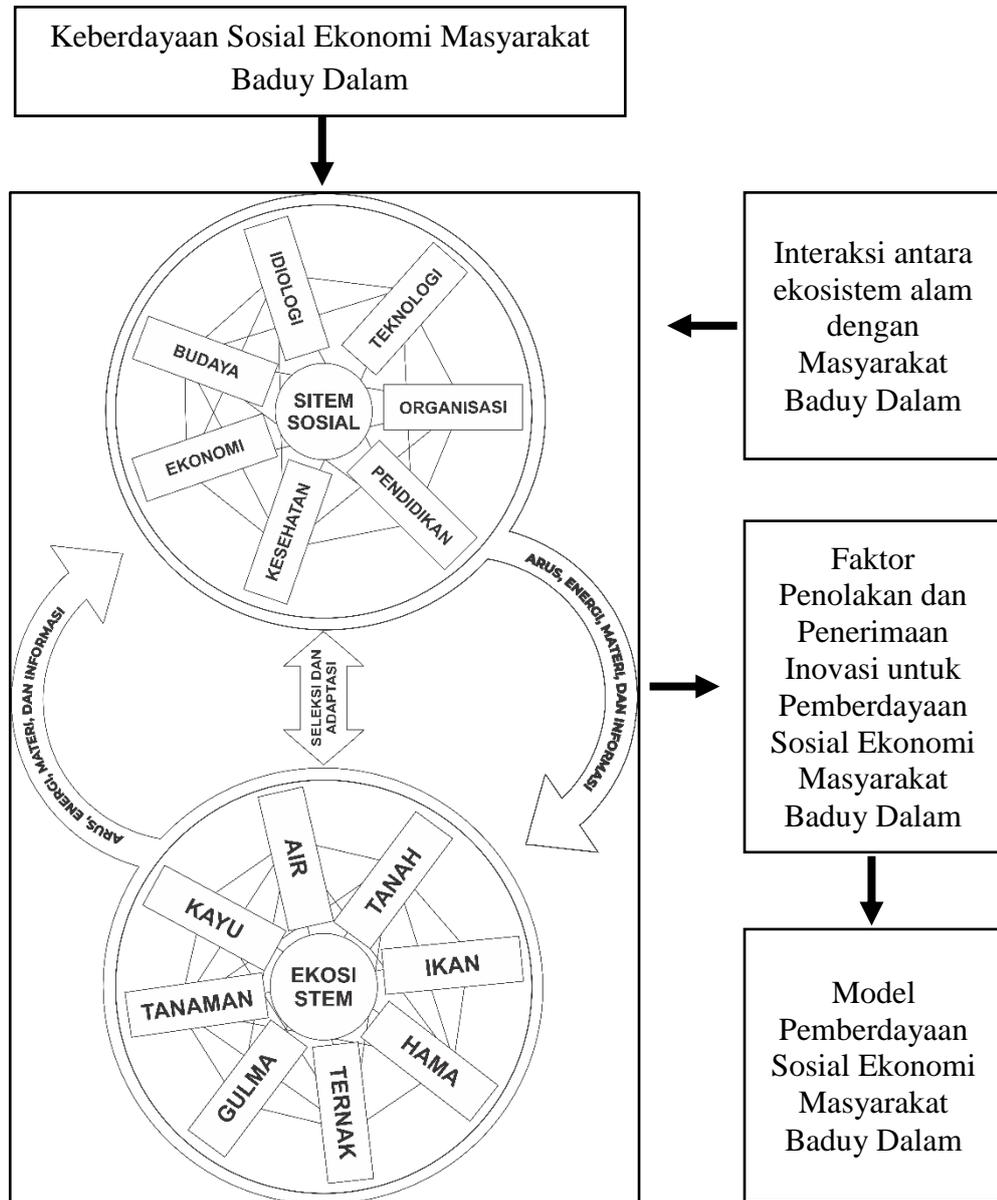
2.14 Kerangka Pemikiran

Model ekologi manusia yang dibuat oleh Terry Rambo merupakan model yang dapat digunakan dalam memahami interaksi antara manusia dengan lingkungan. Model ini mencakup dua aspek yaitu sistem sosial yang terdiri dari teknologi, pola eksplorasi sumber daya, organisasi sosial, ekonomi, pendidikan, ideologi, budaya, bahasa, kesehatan, dan nutrisi. Aspek selanjutnya yaitu ekosistem yang terdiri dari air, tanah, mikroorganisme, ikan, hama, ternak, gulma, tanaman, kayu, dan udara. Elemen-elemen yang ada tersebut dijadikan sebagai tolak ukur bagi peneliti dalam melakukan penelitian mengenai interaksi masyarakat Baduy Dalam dengan lingkungannya.

Masyarakat Baduy Dalam dikenal dengan pola hidupnya yang sangat erat kaitannya dengan alam dan menghindari modernisasi. Masyarakat Baduy Dalam meyakini bahwa tugas mereka adalah untuk menjaga kelestarian alam agar tetap terjaga. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan semua berlandaskan hukum adat (*pikukuh*) yang mereka yakini termasuk kegiatan ekonomi. Masyarakat Baduy percaya bahwa *pikukuh* bertujuan agar masyarakat Baduy bisa mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin sepanjang hidupnya.

Berdasarkan kondisi saat ini yang terjadi pada masyarakat Baduy Dalam, yang menghindari modernisasi dan tetap bertahan dengan kehidupan tradisionalnya. Peneliti tertarik dalam melakukan penelitian untuk mengetahui interaksi antara masyarakat Baduy Dalam dengan lingkungan mereka menggunakan konsep model ekologi manusia Terry Rambo (1983). Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pemanfaatan alam yang dilakukan oleh masyarakat Baduy dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan mereka serta untuk menentukan model pemberdayaan ekonomi yang tepat dilakukan pada masyarakat Baduy Dalam. Kemudian elemen pada sistem sosial dan ekosistem alam akan dibatasi dan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Baduy Dalam dan keperluan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian berdasarkan hasil observasi

yang dilakukan peneliti di lapangan. Pembatasan ini dilakukan agar peneliti fokus pada elemen yang mencirikan karakteristik masyarakat Baduy Dalam. Secara sistematis alur kerangka pikir dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Kerangka pemikiran model pemberdayaan sosial ekonomi pada masyarakat Suku Baduy Dalam yang selaras dengan *Pikukuh Karuhun*

III. METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

Untuk mencegah salah pengertian dan interpretasi antara peneliti dan pembaca, maka definisi operasional diperlukan untuk menjelaskan istilah dalam penelitian yang dilakukan.

1) Pemberdayaan sosial ekonomi

Proses atau upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sosial ekonomi masyarakat suku Baduy Dalam melalui berbagai inisiatif, program, atau kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal.

2) Masyarakat Suku Baduy Dalam

Masyarakat Suku Baduy Dalam adalah kelompok masyarakat yang mendiami wilayah di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Suku Baduy Dalam dikenal dengan ciri khas adat dan cara hidup yang sangat terjaga serta terikat pada aturan-aturan adat yang ketat. Aturan yang mereka jalankan dikenal sebagai *Pikukuh Karuhun* (Aturan Adat dari Leluhur) yang disebarakan melalui mulut ke mulut tanpa adanya pembukuan aturan adat.

3) Kabupaten Lebak

Salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang merupakan lokasi utama penelitian tepatnya di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar. Wilayah ini merupakan tempat tinggal masyarakat Suku Baduy Dalam.

3.2 Tipe Penelitian

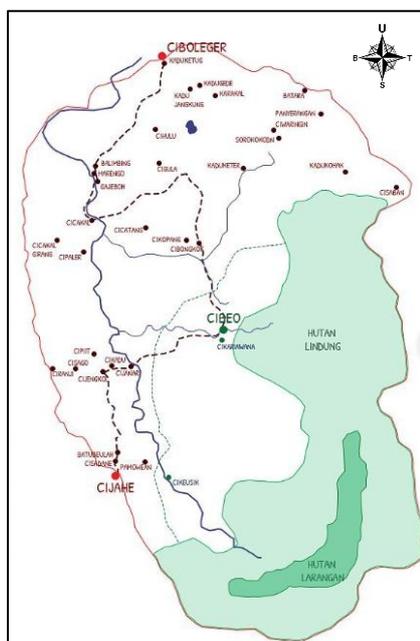
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, pola, desain, motivasi, dan tindakan (Rukin, 2019). Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang terlihat. Metode ini diikuti dengan upaya untuk menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta sejarah tersebut (Milawasri, 2017).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologi dan etnografi. Kedua pendekatan tersebut merupakan pendekatan dalam penelitian kualitatif. Menurut Creswell (dalam Susila, 2015) pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengembangkan pemahaman atau menjelaskan arti dari suatu peristiwa yang dialami oleh individu atau kelompok. Metode ini dilakukan melalui wawancara dan pengamatan, serta bertujuan untuk mengungkap makna dari pengalaman yang dialami secara sadar. Pendekatan etnografi merupakan jenis penelitian kualitatif yang fokus pada pengamatan terhadap anggota kelompok sosial dan budaya dalam kondisi alami mereka. Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung terlibat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy Dalam, melakukan observasi, dan wawancara untuk mengungkap nilai, perilaku, keyakinan, serta bahasa yang dianut oleh masyarakat tersebut. (Susila, 2015).

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian adalah di Kampung Cibeo, Cikeusik, dan Cikartawana Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Penulis memilih lokasi ini karena Kampung Cibeo, Cikeusik, dan Cikartawana merupakan tempat tinggal dari masyarakat Suku Baduy Dalam yang dikenal sebagai salah satu suku di Indonesia yang masih memegang adat istiadatnya dan belum banyak peneliti yang konsen pada masyarakat Baduy Dalam. Selain itu, penulis sebagai

putra daerah Banten merasa terpanggil dan memiliki ikatan serta kepedulian yang lebih untuk menjaga dan melestarikan tradisi Baduy sebagai cagar budaya yang memiliki nilai budaya tinggi sebagai warisan budaya Indonesia. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti model pemberdayaan yang tepat bagi masyarakat Baduy tanpa menghilangkan unsur dari budaya yang mereka miliki. Berikut gambar peta lokasi penelitian yang berada di Desa Kanekes



Gambar 5. Peta Desa Kanekes
Sumber: Dastitahen.com

3.4 Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan salah satu dari teknik sampling dari *non probability sampling*, yaitu teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara memilih subjek berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti dengan berbagai pertimbangan atau alasan bahwa informan tersebut memiliki pemahaman yang mendalam mengenai *pikukuh karuhun* masyarakat Baduy Dalam. Selain itu alasan lain pemilihan informan yaitu kemudahan untuk ditemui dan diwawancarai. Hal ini menjadi dasar

penentuan informan mengingat sulitnya mengajak masyarakat Baduy Dalam untuk di wawancarai.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. *Jaro Tangtu*, sebagai wakil *Puun* atau tangan kanan *Puun* yang memiliki mandat dalam melaksanakan roda pemerintahan dan segala amanat hukum adat yang terdiri dari:
 - 1) *Jaro Sami* (*Jaro Tangtu*/ Wakil *Puun* Kampung Cibeo)
 - 2) *Jaro Alis* (*Jaro Tangtu*/ Wakil *Puun* Kampung Cikeusik)
 - 3) *Jaro Nalim* (*Jaro Tangtu*/ Wakil *Puun* Kampung Cikartawana)
- b. *Jaro Saija* selaku Kepala Desa Kanekes dan sebagai pemimpin di wilayah Baduy secara administratif pemerintahan Indonesia.
- c. Enam orang masyarakat Baduy Dalam, sebagai perwakilan dari setiap kampung, yaitu :
 - 1) Kampung Cibeo (Ayah Mursid dan Kang Asman)
 - 2) Kampung Cikeusik (Ayah Cana dan Ayah Kardi)
 - 3) Kampung Sikartawana (Ayah Sadi dan Kang Yaldi)

Jadi dalam pengumpulan data didasarkan pada informasi yang diberikan informan. Jika beberapa informan yang dimintai keterangan diperoleh hasil yang sama, maka sudah dianggap cukup untuk proses pengambilan data yang diperlukan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pengumpulan data menurut Bungin (2017) yaitu :

a) Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Metode ini digunakan peneliti untuk menggali data dari informan mengenai *Pikukuh Karuhun* serta interaksi timbal balik antara

sistem sosial masyarakat Baduy Dalam dengan ekosistem alam menggunakan model ekosistem Rambo (1983). Proses wawancara dilakukan tanpa alat perekam karena aturan adat masyarakat Baduy Dalam yang melarang adanya alat teknologi yang masuk ke wilayah mereka, sehingga dalam proses mendapatkan informasi peneliti menggunakan catatan pribadi dan daya ingat yang dimiliki.

b) Observasi

Metode observasi adalah salah satu bentuk pengumpulan data primer dan suatu cara yang bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi. Observasi dalam penelitian ini difokuskan pada kondisi lingkungan masyarakat, sarana prasarana yang tersedia serta mengamati aktivitas Masyarakat Baduy Dalam. Hal ini dilakukan untuk mengetahui model pemberdayaan dan penyebab penolakan dan penerimaan pada program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah setempat.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis. Data tambahan terdokumentasi yang digunakan penulis adalah menggunakan data dari Desa Kanekes seperti profil desa dan sejarah Suku Baduy, serta beberapa foto ketika penulis berada di lokasi penelitian. Pengambilan foto dilakukan sebelum masuk ke wilayah Baduy Dalam, karena mengikuti aturan masyarakat Baduy Dalam untuk tidak membawa *handphone*/kamera. Oleh karena itu apabila peneliti mencantumkan dokumentasi, maka gambar tersebut merupakan hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan ketika masih di kawasan Baduy Luar dan belum memasuki wilayah Baduy Dalam.

d) Catatan Lapangan

Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara untuk mengumpulkan data di lapangan. Selama pengamatan, peneliti mencatat informasi penting, seperti kata-kata kunci, frasa, dan inti pembicaraan

dengan informan. Setelah kembali ke tempat tinggal, peneliti menyusun catatan lapangan berdasarkan coretan yang telah dibuat. Catatan ini berisi hasil pengamatan dan wawancara langsung dengan informan mengenai Baduy Dalam.

e) Studi Literatur

studi literatur adalah alat untuk mengumpulkan data guna mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sebagai dasar pembahasan hasil penelitian. Peneliti melakukan studi literatur untuk memperoleh data teoritis yang mendukung kebenaran data yang diperoleh melalui penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai sumber, seperti buku dan artikel ilmiah dari media internet, sebagai referensi untuk memperkuat hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk menyediakan bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji literatur yang relevan.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan mengklasifikasikan dan mengkategorikan data berdasarkan tema yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Bungin (2017) mengungkapkan bahwa pengolahan data penelitian kualitatif terdiri dari:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian (Rijali, 2019).

2) Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Rijali, 2019). Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi (Rijali, 2019). Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

3.7 Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Abdussamad (2022) dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pengecekan. Pelaksanaan teknik pengecekan tersebut meliputi uji *credibility* (Validitas Internal), *transferability* (Validitas Eksternal), *defendability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Penjabaran lebih lengkapnya yaitu sebagai berikut:

a) *Credibility* (Validitas Internal)

Hasil penelitian kualitatif sering kali diragukan karena dianggap tidak memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Oleh karena itu, diperlukan cara-cara untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang dapat memenuhi kriteria kredibilitas. Cara yang dapat dilakukan untuk mengusahakan agar kebenaran penelitian dapat dipercaya yaitu antara lain:

1) Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data penelitian yang telah diperoleh. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah data tersebut benar atau tidak setelah dilakukan pengecekan di lapangan, serta untuk mengetahui apakah data tersebut mengalami perubahan. Jika setelah pengecekan di lapangan data terbukti akurat, maka data tersebut dianggap kredibel, dan waktu perpanjangan dapat diakhiri;

2) Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Menurut Sugiyono dalam Wirayuda (2022) bekal peneliti dalam meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan temuannya yang diteliti;

3) Triangulasi

Triangulasi dalam penelitian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap informasi yang diberikan

oleh setiap informan dalam penelitian. Pengecekan data tersebut untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh informan benar adanya (Bungin, 2017);

4) Menggunakan *member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data (Bungin, 2017). Tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan. Apabila data yang diperoleh peneliti disepakati oleh informan maka data tersebut valid, sehingga semakin kredibel, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti perlu melakukan diskusi kembali dengan informan maka peneliti harus mengubah hasil temuannya menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh informan.

b) *Transferability* (Validitas Eksternal)

Transferability dalam pengujian hasil penelitian merujuk pada sejauh mana hasil tersebut dapat diterapkan dalam konteks sosial yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti perlu menyajikan laporan yang memberikan uraian rinci, jelas, dan sistematis, agar pembaca dapat memahami hasil penelitian kualitatif dengan baik. Dengan demikian, pembaca dapat menentukan kemungkinan penerapan hasil penelitian ini dalam situasi lain.

c) *Defendability* (Reliabilitas)

Dalam uji reliabilitas, peneliti secara kontinyu dibimbing dan diarahkan oleh dua pembimbing untuk mengaudit keseluruhan proses penelitian. Tujuannya adalah agar penulis dapat menunjukkan hasil aktivitas di lapangan serta mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian penelitian, mulai dari menentukan masalah, memasuki lapangan, memilih sumber data, menganalisis data, memastikan keabsahan data, hingga menarik kesimpulan.

d) *Confirmability* (Objektivitas)

Peneliti menguji hasil penelitian dengan mengaitkan proses yang dilakukan di lapangan dan mengevaluasi apakah hasil tersebut merupakan fungsi dari proses penelitian yang telah dilaksanakan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan berikut kesimpulan yang ada pada penelitian ini:

- 1) Interaksi antara ekosistem alam dengan sistem sosial Baduy Dalam merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan. Masyarakat Baduy Dalam merupakan kelompok masyarakat yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pertanian dan hasil alam. Oleh karena itu setiap unsur ekosistem seperti air, tanah, ikan, ternak, tanaman, gulma, dan kayu merupakan unsur-unsur penunjang dalam menyokong kehidupan masyarakat Baduy Dalam, sehingga untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Baduy Dalam harus menerapkan inovasi pemberdayaan yang tidak bertentangan dengan *Pikukuh Karuhun*. Berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang banyak mengeksploitasi alam, masyarakat Baduy Dalam memanfaatkan ekosistem alam dengan nilai-nilai dan norma-norma yang mereka yakini (*Pikukuh Karuhun*) menggunakan peralatan sederhana sebagai penunjang aktivitas pertanian yang mereka jalani sesuai dengan prinsip hidup mereka yaitu “gunung tak boleh dihancurkan, lembah tak boleh dirusak”.
- 2) Faktor-faktor penolakan pemberdayaan masyarakat pada kelompok suku Baduy Dalam dikategorikan ke dalam lima faktor yaitu : 1) kepercayaan terhadap sunda wiwitan (*religious*), 2) kedaulatan dan identitas budaya, 3) ketidaksesuaian program dengan kebutuhan, 4) metode dan pendekatan yang tidak inklusif, dan 5) kurangnya peran pemerintah. Faktor-faktor penolakan pemberdayaan masyarakat pada kelompok suku

Baduy Dalam dikategorikan ke dalam empat faktor yaitu: 1) pendekatan partisipatif, 2) manfaat langsung pada masyarakat, 3) pendampingan dan berkelanjutan, dan 4) peran pemerintah dalam membuat kebijakan.

- 3) Model pemberdayaan sosial ekonomi yang memungkinkan diterapkan pada Masyarakat Baduy Dalam yaitu model pemberdayaan yang selaras dengan *Pikukuh Karuhun* dan memanfaatkan bahan baku yang ada di Baduy Dalam, sehingga tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat Baduy Dalam. Inovasi pemberdayaan dengan memanfaatkan potensi SDA lokal tersebut diantaranya yaitu : 1) sistem peternakan ayam kampung secara semi intensif, 2) Pemanfaatan tanaman orok-orok (*Crotalaria juncea L.*) untuk menyuburkan tanah, 3) Pemanfaatan tanaman hijau dan sampah organik dari sisa-sisa tanaman maupun limbah domestik untuk pembuatan pupuk organik, 4) Pemanfaatan sisa-sisa buah lokal untuk pembuatan Mikro Organisme Lokal (MOL) yang digunakan dalam mempercepat dekomposisi pupuk organik, 5) Pengembangan budidaya koro benguk (*Mucuna pruriens L.*) sebagai bahan dasar pembuatan tempe dalam memenuhi kebutuhan protein masyarakat Baduy Dalam, 6) budidaya terong dan cabai dengan menggunakan bibit unggul, 7) Pemberdayaan ekonomi melalui budidaya pohon *tereup* (*Artocarpus elasticus*), 8) Budidaya lebah madu hutan menggunakan *glodok* (sarang madu dari batang pohon kelapa), dan 9) Pemanfaatan sarang madu hutan untuk pembuatan lilin.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini, yaitu:

- 1) Perlu studi mendalam tentang jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dibudidayakan di lingkungan masyarakat Baduy Dalam untuk kemudian dilakukan pendampingan kepada masyarakat Baduy Dalam agar membudidayakannya.

- 2) Untuk penelitian lanjutan mengenai pemberdayaan di masyarakat Baduy Dalam, dapat dikembangkan pemberdayaan pada sektor lainnya yang dapat mengembangkan keahasan keilmuan dan solusi alternatif pemberdayaan sesuai dengan jenis pemberdayaan yang akan dilakukan.
- 3) Peninjauan kembali masih sangat relevan untuk dilakukan terutama mengidentifikasi jenis kacang-kacangan yang mengandung protein selain koro benguk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., A. S. Ma'arif, D. Ari, N. N. Nurmalawati, dan R. Unaedi. 2023. Implementasi Gaya Hidup Berkelanjutan Masyarakat Suku Baduy Banten. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(2), 607–614.
- Abdussamad, Z. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); Issue 1). CV. syakir Media Press.
- Agus Sifa', M., S. N. Ummah, dan Amalia. 2022. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengemasan dan Pemasaran Produk Lokal (Jambu Mete dan Kawis) Desa Sembungin Kecamatan Bancar. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 1–11.
- Akhmad, R. 2021. Pola Tanam Pertanian Lahan Kering untuk Sistem Polikultur Terintegrasi di Pulau Lombok, Indonesia. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 6(2), 155–163.
- Alhada, M., dan F. Habib. 2021. Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 106–134.
- Anugrawati, D. N., dan G. W. Pradana. 2021. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Tunagrahita Melalui Program Rumah Harapan (Studi Kasus Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 135–144.
- Anwar, A. N. R. 2018. Implementasi Pemberdayaan Nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmu Hukum*, 53(9), 1689–1699.
- Anwar, Zakariya, dan Wahyuni. 2019. Miskin Di Laut Yang Kaya : Nelayan Indonesia. *Sosioreligius*, 1(4), 52–60.
- Asyari, H., Syaripullah, S., dan R. Irawan. 2017. Pendidikan dalam Pandangan Masyarakat Baduy Dalam. *IJER (Indonesian Journal of Educational Research)*, 2(1), 11–17.
- Aulia, T. O. S., dan A. H. Dharmawan. 2010. Kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya air di Kampung Kuta. *Sodality. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 4(3), 345–355.

- Bahrudin, B., A. Zurohman, U. Islam, dan Z. Hasan. 2021. Dinamika kebudayaan Suku Baduy dalam Menghadapi Perkembangan Global di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *Journal Civics & Social Studies*, 5(1), 31–47.
- Bakri, W., S. Laupe, A. Muhammad, dan I. Salam. 2023. Pertambangan Kawasan Karts dan Kondisi Sosial Masyarakat Corresponding Author. *SOSIOLOGIA : Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 3, 139–150.
- Bariroh, A., I. Hambali, dan Nurhadi. 2020. Komunitas Kampung Sinau Sebagai Wahana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Undang-Undang Pentingnya pendidikan bagi Indonesia untuk mengembangkan dan memajukan. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 15(1), 1–19.
- Bintari, R. 2012. Sejarah Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Baduy Pasca Terbentuknya Propinsi Banten Tahun 2000. *Journal of Indonesian History*, 1(1), 18–22.
- Bungin, B. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Dachlan, M. A. B. 2019. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Banten. *Journal Ilmiah Rinjani*, 7(2), 1–10.
- Darwis, R. S., Y. S. Miranti, S. R. Saffana, dan S. Yuandina. 2022. Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 135.
- Diatmika, I. P. G., dan S. Rahayu. 2017. *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah*. Ahlimedia Book.
- Donna, J. N., dan A. C. Budiati. 2022. Perubahan Sosial Pikukuh Karuhun Masyarakat Suku Baduy di Tengah Modernisasi. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11), 1–23.
- Dulkiah, M. 2017. Peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro di Wilayah Jawa Barat. *Jispo*, 7(1), 30.
- Fadillah, M. 2022. Potensi Tanaman Orok-Orok (*Crotalaria juncea L.*) dan Rancangan Sistem Fitoremediator untuk Limbah Cair Tambang demi Mewujudkan Ketersediaan Air Bersih. *Risenologi*, 7(2), 7–15.
- Fasya, G. H. I. 2023. *Studi kearifan lokal etnobotani tumbuhan obat Suku Baduy Luar Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Fatimah, F., dan D. Sandri. 2017. Hilirisasi Sarang Lebah Madu Menjadi Produk Lilin Aromaterapi Bagi Masyarakat Petani Lebah Madu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (MEDITEG)*, 2(1).

- Fitri, I. A. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kawasan Wisata Tarusan Kamang Sumatera Barat. *Almishbahjurnal.Com*, 2.
- Fitriani, D., Y. H. Putri, B. Trihadi, dan A. T. Simanjuntak. 2023. Sosialisasi Pemanfaatan Sarang Lebah Menjadi Lilin Aromaterapi dengan Penambahan Minyak Atsiri Jeruk Kalamansi. *Martabe. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 1165–1170.
- Fontana. 2011. *Innovate We Can: Manajemen Inovasi Dan Penciptaan Nilai Individu, Organisasi, Masyarakat*. Cipta Inovasi Sejahtera.
- Fringka, Y. 2017. Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat, terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi. *Jurnal Sosiologi*, 21(2).
- Gustian, R. 2021. *Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau*.
- Hadi, R. A. 2019. Pemanfaatan MOL (Mikroorganisme Lokal) dari materi yang tersedia di sekitar lingkungan. *Agroscience (Agsci)*, 9(1), 93.
- Hamid, H. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca.
- Hardiyati, N. S. 2017. Tas *Koja* Khas Suku Baduy Lebak Banten. *Pend. Seni Kerajinan-SI (e-Craft)*, 95–104.
- Hargono, A., C. Waloejo, M. P. Pandin, dan Z. Choirunnisa. 2022. Penyuluhan Pengolahan Sanitasi Air Bersih untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Mengare, Gresik. *Journal of Community Engagement*, 3(1), 1–10.
- Hartatik, W., H. Husnain, dan L. R. Widowati. 2015. Peranan pupuk organik dalam peningkatan produktivitas tanah dan tanaman. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 107–120.
- Hasanah, D. R. N. 2018. Analisis Model Pemberdayaan Masyarakat Pada warga Tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Masyarakat Madani*, 3(2), 1–2.
- Hasnidar, Tasnim, W. H. Samsider Sitorus, Mustar, Fhirawati, I. M. Meda Yuliani, Andi Eka Yunianto, R. P. Andi Susilawaty, dan Pattola, S. Efendi Sianturi. 2020. *Ilmu Kesehatan Masyarakat* (A. Rikki (ed.)). Yayasan Kita Menulis.
- Hisyam, C. J. 2021. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bumi Aksara.
- Hutapea. 2022. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pos Pulang Pisau (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab Pulang Pisau). *Jurnal Sosiologi*. 5, 77–84.
- Iskandar, J. 2015. *Studi etnobotani keanekaragaman tanaman pangan pada "Sistem Huma" dalam menunjang keamanan pangan Orang Baduy*. Masyarakat Biodiversitas Indonesia. 1265–1272.

- Iskandar, J. 2022. *Ekologi perladangan Orang Baduy: pengelolaan hutan berbasis adat secara berkelanjutan*. Penerbit Alumni.
- Istan, M. 2017. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics*, 2(1), 81.
- Jamaluddin, Y., F. Fitriani, S. Safrida, dan W. Warjio. 2019. Strategi dan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 9(1), 21.
- Jatmiko, U. 2021. *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Melalui Alokasi Dana Desa*. Penerbit NEM.
- Kameswari, D. 2023. Pemanfaatan Tanaman Herbal dalam Praktik Pengobatan Tradisional Suku Baduy, Kabupaten Lebak, Banten. *Jurnal Riset Dan Konseptual*, 8(1), 160–169.
- Kartika, T., dan E. Edison. 2020. Masyarakat Baduy Dalam Mempertahankan Adat Istiadat Di Era Digital. *Prosiding ISBI Bandung*, 1(1), 56–62.
- Kurnia, A, dan A. Sihabudin. 2010. *Saatnya Baduy Bicara*. Bumi Aksara.
- Kurniasari, N., dan E. Reswati. 2011. Memaknai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 6(1), 7.
- Kusherdyana, R. 2020. Pengertian Budaya, Lintas Budaya, dan Teori yang Melandasi Lintas Budaya. *Pemahaman Lintas Budaya*. 1(1), 1–63.
- Kusmana, E., dan R. R. Garis. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian Oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*, 5(4), 460–473.
- Lesnussa, J. U. 2019. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat di Negeri Halong Baguala Ambon. *Jurnal Sosio Sains*, 5(2), 91–107.
- Lilyawati, S. A., N. Fitriani, dan F. Prasetya. 2019. Proceeding of Mulawarman Pharmaceuticals Conferences. In *Proceeding of Mulawarman Pharmaceuticals*.
- Mada, S. T. M., K. Ni'mah, dan Y. Heryani. 2022. Pola Tanam Polikultur Sayuran Pada Pekarangan Sempit Melalui Sistem Vertikal Garden Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Urnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 2(1), 47–53.
- Maharani, S. D., S. Surono, A. Zubaidi, dan H. Sutarmanto. 2019. Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2), 277.
- Makmur dan Rohana. 2012. *Inovasi dan Kreativitas Manusia Dalam Administrasi dan Manajemen*. Refika Aditama.

- Manik, K. E. S. 2018. *Pengelolaan lingkungan hidup*. Kencana.
- Margayaningsih, D. I. 2018. Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Milawasri, F. A. 2017. Analisis Karakter Tokoh Utama Wanita Dalam Cerpen. *Jurnal Bindo Sastra*, 1(2), 87–94.
- Muchlis, M., Rustopo, Guntur, dan Sunarmi (2021). Akulturasi Material Pada Proses Pembuatan Tas *Koja* dan Dampaknya Terhadap Aturan Adat Istiadat Suku Baduy. *CAKRAWALA –RepositoriIMWI*, 4(1), 94–99.
- Muhibah, S., dan R. B. Rohimah. 2023. Mengenal Karakteristik Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar. *Jawara*, 9(1), 73–85.
- Mulyadi, E., dan E. Furqon. 2021. Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 165–178.
- Nadroh, S. 2018. Pikukuh Karuhun Baduy Dinamika Kearifan Lokal di Tengah Modernitas Zaman. *Jurnal Pasupati*, 5(2), 196.
- Nasarudin dan Siti Ahyuni. 2023. *Strategi pendampingan industri kreatif menengah kerajinan baduy berbasis local wisdom: tinjauan model triple helix*. 1(1), 46–63.
- Nasmi, M. H., dan D. Maani. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) di Kecamatan Bintan Timur Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1–12.
- Nugraha, F., dan G. K. Praramdana. 2022. Abdimas Siliwangi. *Abdimas Siliwangi*, 03(01), 363–370.
- Nur Aminah, L., R. Qurniati, dan W. Hidayat. 2014. Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan Petani di Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Sylva Lestari*, 1(1), 47.
- Nur, S. 2019. Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan dan Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup. *An-Nisa*, 10(1), 99–111.
- Ozian, N., F. Agustina, dan H. Moelyo. 2019. Sistem Pemeliharaan dan Kontribusi Usaha Ternak Ayam Lokal (*Gallus Domesticus*) Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Peternak Di Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat. *Journal of Integrated Agribusiness*, 1(2), 107–114.
- Paramita, S. 2018. Pergeseran Makna Budaya Ondel-Ondel pada Masyarakat Betawi Modern. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 1(1).
- Permana, R. C. E., I. P. Nasution, dan J. Gunawijaya. 2011. Kearifan lokal tentang mitigasi bencana pada masyarakat Baduy. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 15(1), 67–76.

- Pratama, C. 2013. Kebijakan dan Manajemen Publik Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan Desa Joho di Lereng Gunung Wilis. *Jl Airlangga*, 1(1), 4–6.
- Pratama, F. S. 2023. *Mengkaji Ulang Pola Pemberdayaan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi Pendahuluan*. 11(1), 40–53.
- Radiansyah, R. R., dan F. A. Syiddiq. 2021. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Bandung (Studi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung). *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 5(1), 109–137.
- Rahayu, N. A., M. N. Cahyanto, dan R. Indrati. 2019. Pola Perubahan Protein Koro Benguk (*Mucuna pruriens*) Selama Fermentasi Tempe Menggunakan Inokulum Raprime. *AgriTECH*. 39(2), 128–135.
- Rambo, A. T. 1983. *Conceptual Approaches to Human Ecology East-West Center*. 14, 1–24.
- Ratna, S. D., dan A. Saefuddin. 2011. Isolasi *Rhizopus Oligosporus* Pada Beberapa Inokulum Tempe Di Kabupaten Banyumas. *Molekul*, 6(2), 93–104.
- Rijali, A. 2019. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81.
- Rukin. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Safitri, H. F. D., dan T. A. Syahara. 2021. Model Komunikasi *Top Down* dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Borobudur Communication Review*, 1(1), 12–20.
- Sandri, D., F. Fatimah, E. Adlhani, dan L. Erlinda. 2016. Optimasi penambahan minyak atsiri bunga kamboja terhadap lilin aromaterapi dari lilin sarang lebah. *Jurnal Teknologi Agro-Industri*, 3(1).
- Sari, N. K., R. Qurniati, dan R. Hilmanto. 2013. *Analisis Finansial Usaha Budidaya Lebah Madu Apis cerana Fabr di Dusun Sidomukti Desa Buana Sakti*. 1(1), 29–36.
- Satria Mentari Tumbel. 2014. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus desa Tumuluntung satu kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)*.
- Senoaji, G. 2010. Masyarakat Baduy, Hutan, dan Lingkungan (Baduy Community, Forest, and Environment). *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 17(2), 113–123.
- Sihabudin, A. 2017. *Keberhasilan Program Keluarga Berencana pada Kelompok Masyarakat Adat Terpencil Baduy di Kabupaten Lebak Banten*. 633–652.

- Sihabudin, A., B. Mutjaba, dan I. Dimiyati. 2018. Adopsi Inovasi Program Keluarga Berencana oleh Akseptor dari Komunitas Adat Terpencil Baduy di Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak. *Jurnal Penyuluhan*, 14(1), 175–188.
- Sri Kurniawati, dan Iin Setyowati. 2017. Kearifan Lokal Masyarakat Suku Baduy Dalam Mengendalikan Hama dan Penyakit Padi. *Prosiding Seminar Nasional Agroinovasi Spesifik Lokasi Untuk Ketahanan Pangan Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*, 247–257.
- Suhartini, R. 2005. *Model-model pemberdayaan masyarakat*.
- Suharto, E. 2017. *Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama.
- Sujana, A. M. 2020. Pikukuh : Kajian Historis Kearifan Lokal Pitutur dalam Literasi Keagamaan Masyarakat Adat Baduy. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 3(2), 81–92.
- Sulistiyani, A. T. 2017. *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Media.
- Sumawijaya, I. N. Sumaryadi, E. Hasan, dan S. Lukman. 2020. Implementasi Kebijakan Pembangunan Suku Baduy Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 3(2), 130–145.
- Suriani, S., dan C. N. Keusuma. 2015. Pengaruh pembangunan infrastruktur dasar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), 1–18.
- Suryana, S. 2019. Model Pemberdayaan Pendidikan Non Formal (Pnf) Dalam Kajian Kebijakan Pendidikan. *Edukasi*, 13(2), 1–12.
- Susanto, S. A., H. J. Budirianto, dan A. C. Maturbongs. 2020. Peran Vegetasi Dominan Pada Karakteristik Tanah di Lahan Bera, Kampung Womnowi, Distrik Sidey, Manokwari. *Jurnal Biologi TrSopis*, 20(2), 227–236.
- Susila, I. 2015. Pendekatan Kualitatif Untuk Riset Pemasaran dan Pengukuran Kinerja Bisnis. *BENEFIT Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 19(1), 12–23.
- Sutisna, M., D. J. Hidayat, M. A. Sudrajat, R. Ramdani, dan M. Malik. 2023. Eksistensi Pikukuh Adat Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Baduy di Desa Kanekes. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(2), 600–606.
- Suwasono, S., Jayus, dan P. Sari. 2022. Pengembangan Produk Tempe Berbasis Koro di Desa Banjarsengon, Kecamatan Patrang. *Jurnal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember*, 1(1), 36–43.
- Syaufina, L. 2017. *Kearifan Lokal Masyarakat Adat Baduy dalam Pembukaan Lahan di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Lebak Banten*.

- Totok Mardikanto dan P. Soebiato. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Wirayuda, A. S. 2022. Kegiatan Ekstrakurikuler Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. *AMERTA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humonira*, 1(2), 20–31.
- Wrihatnolo, R. R., dan R. N. Dwidjowijoto. 2007. Manajemen pemberdayaan: Sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat. *Jakarta: PT Elex Media Komputindo*, 17.
- Yani, A. Y. 2018. Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Sektor Non Formal Pada Pembinaan Narapidana Perempuan Melalui Program Keterampilan Menjahit Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 3(2).
- Yuliana, A. I., dan M. S. Ami. 2021. Analisis vegetasi dan potensi pemanfaatan jenis gulma pasca pertanaman jagung. *Jurnal Agroteknologi Merdeka Pasuruan*, 4(2), 20–28.